



SURAT KETERANGAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
No. 588/C.02.01/LP2M/VIII/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dr. Tarsisius Kristyadi, S.T., M.T.
Jabatan : Kepala
Unit Kerja : LP2M-Itenas
JL. P.K.H. Mustafa No.23 Bandung

Menerangkan bahwa,

Nama	NPP	Jabatan
Iredo Bettie Puspita, S.T., MT.	20150504	Tenaga Ahli

Telah melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut :

Nama Kegiatan : Pengembangan Kawasan Segitiga Emas Cirebon-Patimban-Kertajati
Tempat : BAPPEDA Provinsi Jawa Barat
Waktu : 01 Juli - 01 Agustus 2019
Sumber Dana : BAPPEDA Provinsi Jawa Barat

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 27 Agustus 2019

Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat (LP2M) Itenas
Kepala,

Dr. Tarsisius Kristyadi, S.T., M.T.
NPP 960604



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Ir. H. Juanda No. 287 Telepon 2516061 (hunting 6 line) Fax: 2510731
Website: <http://www.bappeda.jabarprov.go.id>, Email: public@bappeda.jabarprov.go.id
BANDUNG-40135

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 660/2169/infaswil
TENTANG

TIM AHLI PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN SEGITIGA EMAS
CIREBON-PATIMBAN-KERTAJATI

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembangunan kawasan Segitiga Emas Cirebon-Patimban-Kertajati telah dibentuk Tim Percepatan Pembangunan Kawasan Segitiga Emas Cirebon-Patimban-Kertajati yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 410.05/Kep.376-BAPP/2019 tentang Tim percepatan Pembangunan Kawasan Segitiga Emas Cirebon - Patimban - Kertajati Tahun 2019;
 - b. bahwa untuk optimalisasi percepatan pembangunan kawasan Segitiga Emas Cirebon-Patimban-Kertajati, diperlukan tim ahli yang mempunyai keahlian di bidang ilmu tertentu yang menunjang optimalisasi tugas dan fungsi Tim Percepatan Pembangunan Kawasan Segitiga Emas Cirebon-Patimban-Kertajati sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Ahli Percepatan Pembangunan Kawasan Segitiga Emas Cirebon-Patimban-Kertajati;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten

182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 - 2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
7. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 91);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 226);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
14. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 410.05/Kep.376-BAPP/2019 tentang Tim Percepatan Pembangunan Kawasan Segitiga Emas Cirebon - Patimban - Kertajati, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| Menetapkan
KESATU | : | Tim Ahli Percepatan Pembangunan Kawasan Segitiga Emas Cirebon-Patimban-Kertajati yang selanjutnya disebut Tim Ahli REBANA dengan nama-nama dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Tim Ahli REBANA sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas membantu Tim Percepatan Pembangunan Kawasan Segitiga Emas REBANA dalam memberikan wawasan perencanaan, pengembangan dan pengelolaan kawasan Segitiga Emas Cirebon-Patimban-Kertajati (REBANA). |
| KETIGA | : | Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Ahli Percepatan Pembangunan Kawasan Segitiga Emas REBANAselanjutnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU |

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Jawa Barat.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 28 Mei 2019

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT



Dr. Ir. H. M. TAUFIQ BUDI SANTOSO, M.Soc.Sc
Pembina Utama Madya
NIP. 19670421 199203 1 013

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
 NOMOR : 660/2164/InfraSWII
 TANGGAL : 28 Mei 2016
 TENTANG : TIM AHLI PERCEPATAN
 PEMBANGUNAN KAWASAN
 SEGITIGA EMAS CIREBON-
 PATIMBAN-KERTAJATI.

NAMA DAN URAIAN TUGAS TIM AHLI PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN
 SEGITIGA EMAS CIREBON-PATIMBAN-KERTAJATI

Nama	Uraian tugas
a. Anggota	
1. Prof. Dr. Ir. B. Kombaitan, M.Sc.	a. memberikan bahan pertimbangan sebagai pandangan alternatif dalam perumusan konsep pengembangan Kawasan;
2. Prof. Oekan S. Abdoellah, M.A.,Ph.D.	b. memberikan rekomendasi konsep pengembangan kawasan; dan
3. Prof. Dr. Ina Primiana, S.E., M.T.	c. memberikan gagasan, ide dan pemikiran dalam penyusunan strategi implementasi pengembangan Kawasan.
4. Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H.	
5. Dr. Ir. Heru Purboyo Hidayat P, DEA	
6. Dr. Ir. Denny Zulkaidi, M.U.P.	
7. Dr. Ir. Son Diamar, M.Sc.	
8. Ireto Bettie Puspita, ST.,MT.	
9. Ir.Romeiza Syafriharti, MT.	
b. Pendamping	
1. Delsi Taurustiati, S.KM., M.KM., M.Med.Sc	a. memberikan bantuan dan pendampingan tim ahli dalam pelaksanaan percepatan pembangunan Kawasan segitiga emas Cirebon-Patimban-Kertajati ;
2. Ane Carolina, S.Si.,M.Eng	b. menyusun rencana tindak lanjut pelaksanaan percepatan pembangunan Kawasan segitiga emas Cirebon-Patimban-Kertajati;
3. Gilang Bayu Erlangga, SE	c. melaksanakan operasional harian pelaksanaan tugas pendampingan tenaga ahli;
4. Widhi Depi Saputro, S.Kom	d. membantu tim ahli dalam melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan atau Unit Kerja serta pihak lain terkait;
5. Sismadani, ST	e. menghimpun serta menyampaikan laporan dan rekomendasi laporan hasil
6. Nisa Shifa Rahimah, ST.,MT	
7. Annisa Puteri Utari Syamsuddin A.Md	
8. Sani Satya Pratiwi, S.S	
9. Siti Aminah, SHI	
10. Windy Farida Wulandari, SPW	
11. M.Raihan Afif, ST	
12. Wiki Arifin Sabekti, A.Md	
13. Fahmy Rinaldy, SE	
14. Helmi Makarim, SE	
15. M.Insan Al-Amin, ST	

Nama	Uraian tugas
18. Yasina Ayu Mulia, ST.	pengambilan kebijakan kepada pimpinan;
19. Muhammad Fajri Arief Mahmuda, ST.	f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas tim ahli.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : Mei 2019

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT



Dr. Ir. H. M. TAUFIQ BUDI SANTOSO, M.Soc.Sc
Pembina Utama Madya
NIP. 19670421 199203 1 013



SURAT KETERANGAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
No. 588/C.02.01/LP2M/VIII/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dr. Tarsisius Kristyadi, S.T., M.T.
Jabatan : Kepala
Unit Kerja : LP2M-Itenas
JL. P.K.H. Mustafa No.23 Bandung

Menerangkan bahwa,

Nama	NPP	Jabatan
Iredo Bettie Puspita, S.T., MT.	20150504	Tenaga Ahli

Telah melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut :

Nama Kegiatan : Pengembangan Kawasan Segitiga Emas Cirebon-Patimban-Kertajati
Tempat : BAPPEDA Provinsi Jawa Barat
Waktu : 01 Juli - 01 Agustus 2019
Sumber Dana : BAPPEDA Provinsi Jawa Barat

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 27 Agustus 2019

Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat (LP2M) Itenas
Kepala,

Dr. Tarsisius Kristyadi, S.T., M.T.
NPP 960604

**KAJIAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN SEGITIGA EMAS
CIREBON-PATIMBAN-KERTAJATI (REBANA)**

Rapat Pembahasan Konsep Pengembangan Kawasan Segitiga Emas Rebana

LAPORAN PENGABDIAN MASYARAKAT

DISUSUN OLEH :

Iredo Bettie Puspita, ST., MT.

**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
BANDUNG**

2019

KATA PENGANTAR

Kajian Bidang Fisik ini dimaksudkan untuk menghasilkan kajian akademik yang terkait dengan isu-isu strategis kewilayahan di Provinsi Jawa Barat, dimana hasilnya dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Kajian ini diperlukan dalam rangka untuk membantu Bidang Kewilayahan dan Infrastruktur, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat, sebagai pihak di dalam Bappeda Provinsi Jawa Barat yang bertanggung jawab terkait fisik dan infrastruktur wilayah Jawa Barat, dalam merespon isu-isu strategis yang berkembang.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan Kajian Bidang Fisik ini, maka disusun Laporan Tenaga Ahli Bidang Fisik. Adapun Laporan ini menjelaskan tentang rincian kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan Kawasan Segitiga Emas Cirebon-Patimban-Kertajati (Rebana).

Terkait dengan penyusunan Laporan ini, penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam melaksanakan kajian ini. Demikian Laporan ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai pertanggungjawaban kegiatan dan kiranya bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan di Bappeda Provinsi Jawa Barat. Terima kasih.

Agustus, 2019

Iredo Bettie Puspita, ST., MT.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	4
BAB 1 PENDAHULUAN	5
1.1 LATAR BELAKANG	5
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	6
1.3 LINGKUP KEGIATAN.....	6
1.4 KELUARAN.....	6
1.5 SISTEMATIKA LAPORAN TENAGA AHLI	6
BAB 2 PELAKSANAAN KEGIATAN	8
2.1 KETERKAITAN KAJIAN BIDANG KEWILAYAHAN DAN INFRASTRUKTUR BEPPEA PROVINSI JAWA BARAT DENGAN MISI JABAR JUARA.....	8
2.2 KONSEPSI PENGEMBANGAN KAWASAN REBANA.....	9
2.3 KAJIAN KETERKAITAN KAWASAN UNTUK PENGEMBANGAN KAWASAN REBANA	11
2.4 KAJIAN DAYA SAING KAWASAN INDUSTRI DI SEKITAR KAWASAN REBANA	15
2.5 KAJIAN ARAHAN PENGEMBANGAN INDUSTRI	17
2.6 DAYA DUKUNG KAWASAN REBANA.....	20
2.7 PERINCIAN JENIS INDUSTRI YANG DAPAT DIKEMBANGKAN PADA TIAP KAWASAN	22
2.8 PEMETAAN BENTUK PENGELOLAAN KAWASAN	23

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Keterkaitan Kajian Bidang Kewilayahan dan Infrastruktur Bappeda Provinsi Jawa Barat Dengan Misi Jabar Juara	8
Tabel 2.2	Perkembangan Kawasan Industri di Sekitar Kawasan Rebana	16
Tabel 2.3	Arahan Pengembangan Jenis Industri di Kawasan Rebana Berdasarkan Kabupaten	18
Tabel 2.4	Sebaran Luas KP2B di Kabupaten Subang	20
Tabel 2.5	Sebaran Kawasan Hutan yang Terdapat di Kawasan Rebana	22
Tabel 2.6	Analisis Arahan Industri Tiap Kawasan di Dalam Rebana	24
Tabel 2.7	Berbagai Bentuk Pengelolaan Kawasan	34
Tabel 2.8	Dasar Pertimbangan Pemilihan Kedua Bentuk Pengelolaan Kawasan Segitiga Rebana	41
Tabel 2.9	Kelemahan, Kelebihan, dan Prasyarat Masing-Masing Bentuk Pengelolaan Kawasan Segitiga Rebana	42
Tabel 2.10	Penilaian Kriteria Pada Masing-Masing Bentuk Pengelolaan Kawasan Segitiga Rebana	43
Tabel 2.11	Pemenuhan Kriteria KSN dan KSP Pada Kawasan Segitiga Rebana	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Kajian Pemantapan Pengembangan Kawasan Segitiga Rebana	9
Gambar 2.2	Konsep Besar Pengembangan Kawasan Rebana	10
Gambar 2.3	Kerangka Pengembangan Kawasan Rebana	11
Gambar 2.4	Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Aglomerasi Industri yang Dilakukan di China	12
Gambar 2.5	Arahan Pengembangan Kawasan Perkotaan Cirebon dan Sekitarnya	13
Gambar 2.6	Konsepsi Keterkaitan Kawasan Rebana Dengan Kawasan Sekitarnya	14
Gambar 2.7	Kemungkinan Dampak yang Ditimbulkan Oleh Pengembangan Kawasan Rebana Pada Kawasan Sekitarnya.....	14
Gambar 2.8	Keterkaitan Kajian Pemantapan Pengembangan Kawasan Rebana Dengan Kajian Lainnya yang Terdapat di Bidang Kewilayahan dan Infrastruktur, Bappeda Provinsi Jawa Barat.....	15
Gambar 2.9	Pengembangan Kawasan Rebana Dalam Kebijakan Pengembangan Provinsi dan Nasional.....	18
Gambar 2.10	Kondisi Ketersediaan Air Tanah di Kawasan Rebana.....	19
Gambar 2.11	Sebaran dan Delineasi Pengembangan Kawasan di Rebana.....	20
Gambar 2.12	Sebaran KP2B di 4 Kabupaten.....	21
Gambar 2.13	Sebaran KP2B di 4 Kabupaten Dengan Delineasi 11 Kawasan Rebana ...	21
Gambar 2.14	Sebaran Kawasan Lindung di 4 Kabupaten.....	22
Gambar 2.15	Persebaran Kawasan Strategis di Provinsi Jawa Barat	33
Gambar 2.16	Persebaran Struktur Ruang Provinsi Jawa Barat.....	33
Gambar 2.17	Ilustrasi Konsep Pengembangan KEK Segitiga Rebana.....	40
Gambar 2.18	Ilustrasi Konsep Pengembangan Kawasan Dengan Penyebutan Kawasan Segitiga Rebana Sebagai “Branding Kawasan”	40

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi di Indonesia dengan penduduk terbanyak, yaitu 45.340.800 jiwa pada tahun 2018. Jumlah ini meningkat dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 1,9%. Peningkatan penduduk ini berdampak pada peningkatan kebutuhan berbagai kebutuhan dasar yang perlu disiapkan dan dipenuhi oleh pemerintah yang tentunya akan berdampak juga pada kondisi kewilayahan dan infrastruktur di Jawa Barat.

Selain itu, Provinsi Jawa Barat ini juga merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki posisi yang strategis, baik dari sisi fisik maupun ekonomi. Provinsi ini merupakan provinsi yang berbatasan langsung dengan ibukota negara, sehingga kondisi kewilayahan di provinsi ini dipengaruhi oleh perkembangan yang terjadi di ibukota negara. Dengan posisinya yang strategis ini, Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu pusat industri manufaktur dan strategis nasional, dimana di provinsi ini memiliki 3 (tiga) Pusat Kegiatan Nasional (PKN), serta instalasi vital nasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta pertahanan dan keamanan. Posisi strategis yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat ini diikuti pula dengan kondisi alam yang unik, dimana kondisi alamnya memiliki struktur geologi yang kompleks dengan wilayah pegunungan di bagian tengah dan selatan, serta dataran rendah di wilayah utara, yang menyebabkan pembangunan fisik kewilayah di Jawa Barat tidaklah mudah.

Dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi yang diikuti dengan posisi strategis wilayahnya, Provinsi Jawa Barat ini memiliki posisi yang penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Hal ini teridentifikasi dari kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) Provinsi Jawa Barat yang mencapai 14,33% terhadap PDB nasional. Dari sisi sektor ekonomi, sektor industri manufaktur berkontribusi paling besar, yaitu sebesar 60% terhadap PDB sektor industri manufaktur nasional. Selain itu, Jawa Barat juga berkontribusi terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 34,46% terhadap nasional, serta menjadi penyumbang produsen beras nasional sebesar 17,76% yang menjadi salah satu komoditi ekspor nasional.

Arti penting pembangunan yang terjadi di Provinsi Jawa Barat ini berpengaruh pada kondisi kewilayahan, termasuk di dalamnya adalah pembangunan infrastruktur. Hal ini menimbulkan adanya beberapa isu-isu strategis yang perlu diantisipasi sejak awal, seperti pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi baru untuk menyelesaikan masalah ketimpangan wilayah, kemiskinan, dan pengangguran, serta konsentrasi perkembangan fisik wilayah pada beberapa kota/kabupaten tertentu yang menyebabkan tidak meratanya beban pembangunan. Untuk dapat mengantisipasi dan merespon dengan baik isu-isu strategis tersebut, maka diperlukan beberapa kajian, khususnya kajian bidang fisik, yang didasarkan pada dasar keilmuan yang tepat sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam proses pengambilan keputusan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan latar belakang kajian yang telah diuraikan tersebut, maksud dari kajian bidang fisik adalah untuk memberikan masukan dan pertimbangan mengenai isu-isu strategis kewilayahan Jawa Barat dari sudut pandang kajian yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mencapai maksud tersebut, maka tujuan dari kajian bidang fisik ini adalah menghasilkan kajian-kajian akademik yang terkait dengan pengembangan fisik dan infrastruktur di wilayah Provinsi Jawa Barat yang dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam mengambil keputusan.

1.3 LINGKUP KEGIATAN

Berdasarkan maksud dan tujuan tersebut, lingkup kegiatan yang dilakukan pada kajian bidang fisik ini pada dasarnya merujuk pada isu-isu kritis yang sedang menjadi perhatian utama dari Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Bappeda Provinsi Jawa Barat. Adapun isu-isu kritis yang dimaksud adalah pengembangan Kawasan Segitiga Rebana, dengan lingkup kajian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- kajian landasan kebijakan pengembangan kawasan
- kajian ketersediaan sumber daya untuk penunjang pengembangan kawasan
- kajian pengembangan ekonomi kawasan
- kajian dampak pengembangan kawasan
- kajian konsep pengembangan kawasan

1.4 KELUARAN

Kajian bidang fisik ini pada dasarnya merupakan kajian sifatnya akademik untuk membantu Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam menganalisis atau mengkaji isu-isu strategis yang saat ini ditangani dan menjadi perhatian utama Bappeda Jawa Barat. Oleh karena sifatnya akademik, maka keluaran dari kajian ini berupa laporan kajian yang akan terangkum dalam dokumen kajian sesuai dengan lingkup kegiatan yang ditugaskan, yaitu Dokumen Laporan Kajian Pemantapan Pengembangan Kawasan Segitiga Rebana, yang di dalamnya memuat tentang:

- kajian landasan kebijakan pengembangan kawasan
- kajian ketersediaan sumber daya untuk penunjang pengembangan kawasan
- kajian pengembangan ekonomi kawasan
- kajian dampak pengembangan kawasan
- kajian konsep pengembangan kawasan

1.5 SISTEMATIKA LAPORAN TENAGA AHLI

Untuk memudahkan memahami isi dari laporan ini, maka laporan ini akan terbagi menjadi 2 (dua) bab, yaitu:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan dasar pemikiran, beserta tujuan dan sasaran dari pelaksanaan kajian, lingkup kajian yang dilakukan, keluaran yang dihasilkan dari kajian ini, serta sistematika laporan.

BAB 2 PELAKSANAAN KEGIATAN

Bab ini menjelaskan rincian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dengan merujuk pada rencana penugasan yang diberikan. Secara sistematis, pada bab ini akan menjelaskan rincian proses pelaksanaan kajian yang dilakukan.

BAB 2 PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 KETERKAITAN KAJIAN BIDANG KEWILAYAHAN DAN INFRASTRUKTUR BEPPERA PROVINSI JAWA BARAT DENGAN MISI JABAR JUARA

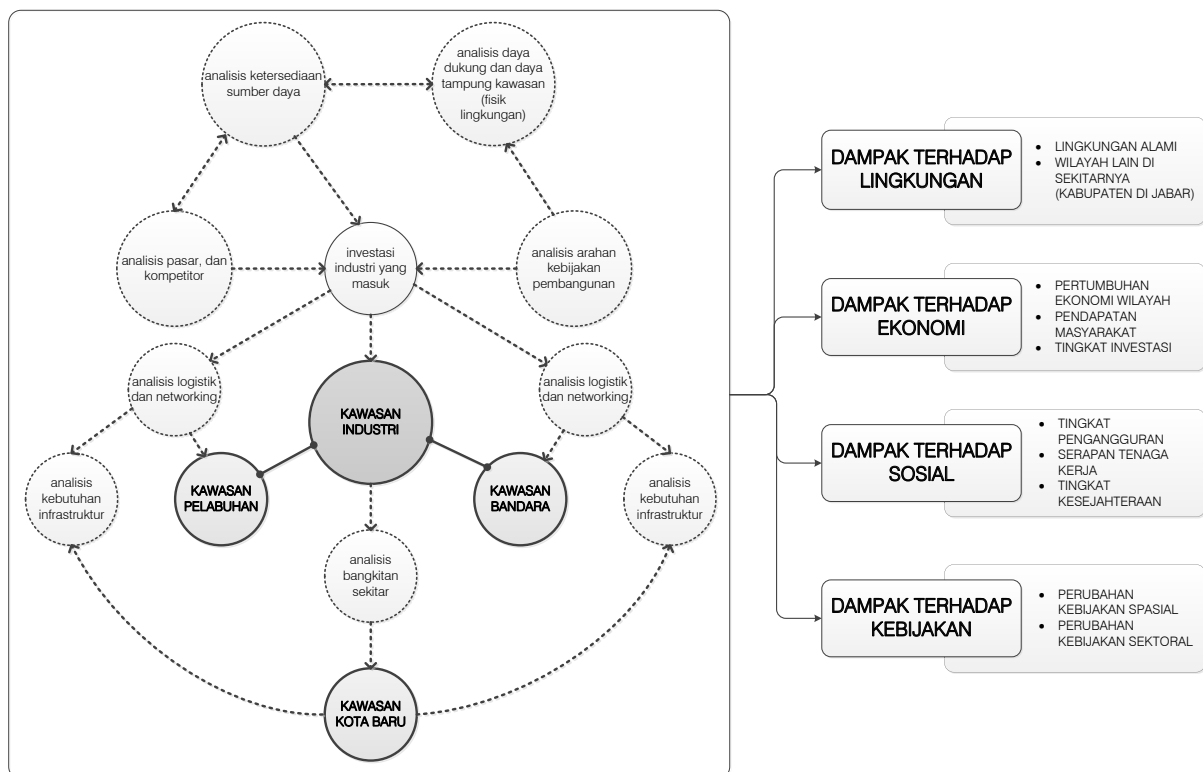
Kajian tim ahli bidang fisik ini didasarkan pada kebutuhan untuk menjawab secara cepat kebutuhan untuk perwujudan Jabar Juara yang menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Terkait dengan hal ini, sebelum perumusan *timeline* dilakukan terlebih dahulu kajian keterkaitan kajian bidang fisik, baik yang dilakukan dalam lingkup kajian tim ahli ini maupun kajian yang dilakukan oleh Bidang Kewilayahan dan Infrastruktur Bappeda Provinsi Jawa Barat dengan target misi Jabar Juara. Dari hasil kajian, dapat diidentifikasi bahwa di dalam Bidang Kewilayahan dan Infrastruktur Bappeda Provinsi Jawa Barat, terdapat 3 (tiga) isu strategis yang diangkat, yaitu isu strategis yang terkait dengan pengembangan Kawasan Rebana, pemindahan pusat pemerintahan provinsi, serta penyediaan air bersih untuk mengatasi masalah kekeringan dan kerentanan air. Berdasarkan hasil analisis, ketiga isu tersebut pada dasarnya akan menjawab 4 (empat) misi dari 8 (delapan) misi Jabar Juara. Adapun keempat misi yang dimaksud meliputi misi 2, misi 3, misi 4, dan misi 5. Rincian keterkaitan keempat misi tersebut dengan isu strategis yang diangkat dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1 Keterkaitan Kajian Bidang Kewilayahan dan Infrastruktur Bappeda Provinsi Jawa Barat Dengan Misi Jabar Juara

JABAR JUARA	KAJIAN BIDANG FISIK		
	REBANA	PEMINDAHAN PUSAT PEMERINTAHAN	PENYEDIAAN AIR BERSIH*
MISI 2:			
• Kesehatan Juara			√
• Perguruan Tinggi Juara	√		
• SMK Juara	√		
MISI 3:			
• Logistik Juara	√		
• Kota Juara		√	
• Pantura Juara	√		
• Energi Juara	√		
MISI 4:			
• Ekonomi Kreatif Juara	√		
• Industri Juara	√		
MISI 5:			
• Birokrasi Juara	√		
• ASN Juara		√	

Keterangan: * saat ini tidak menjadi lingkup kajian tim ahli bidang fisik

Merujuk pada keterkaitan dengan misi Jabar Juara tersebut, maka kajian pemantapan pengembangan Kawasan Segitiga Rebana perlu didasarkan pada suatu kerangka kajian yang utuh. Untuk kajian pemantapan pengembangan Kawasan Segitiga Rebana sendiri, kajian yang dilakukan pada dasarnya akan mencoba menyeimbangkan antara kajian *supply* dan *demand*. Kajian *supply* akan mengidentifikasi semua sumberdaya yang dimiliki oleh kawasan, termasuk di dalamnya adalah sumber daya manusia, sumber daya alam dan lingkungan, serta infrastruktur pendukung. Dari sisi *demand* akan diamati dari sisi peluang pasar dan arahan kebijakan yang diamatkan pada kabupaten yang menjadi bagian dari Rebana ini. Dari kajian *supply* dan *demand* ini perlu diamati pula dampak yang akan dihadapi dari pengembangan kawasan, termasuk di dalamnya adalah dampak terhadap lingkungan, ekonomi, sosial, dan kebijakan. Secara garis besar kerangka kajian pemantapan pengembangan Kawasan Segitiga Rebana akan dilakukan sebagaimana pada Gambar 2.1.



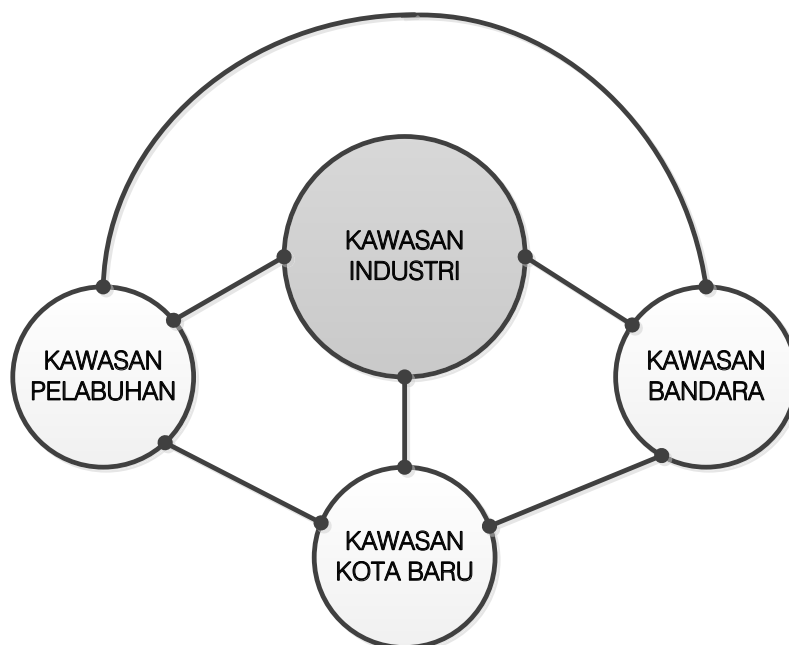
Gambar 2.1 Kerangka Kajian Pemantapan Pengembangan Kawasan Segitiga Rebana

2.2 KONSEPSI PENGEMBANGAN KAWASAN REBANA

Pengembangan Kawasan Rebana ini pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pengembangan kawasan yang ada, utamanya kebijakan nasional dan kebijakan provinsi. Dalam kebijakan nasional yang tertuang dalam RTRWN, kawasan ini pada dasarnya merupakan kawasan yang berkaitan dengan pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Cirebon yang diarahkan dengan peran menjadi pusat koleksi dan distribusi skala internasional, nasional, dan beberapa provinsi. Selain itu, di dalam dokumen ini juga ditetapkan Indramayu sebagai salah satu PKW dengan peran sebagai pusat koleksi dan distribusi skala nasional. Dalam kebijakan nasional yang tertuang dalam dokumen Rencana Pengembangan Industri Terpadu WPS 8: Jakarta-Cirebon-Semarang dan Rencana Pengembangan Kawasan Perkotaan Cirebon dan Sekitarnya, kawasan ini menjadi kawasan

yang menjadi perhatian utama nasional untuk pengembangan infrastruktur. Adapun dari sisi kebijakan RIPPIN 2015-2035, kawasan ini termasuk dalam pengembangan industri prioritas di WPPI 1 (Bogor-Bekasi-Karawang-Purwakarta-Subang) dan WPPI 1 (Indramayu-Cirebon-Majalengka). Dari sisi kebijakan provinsi, kawasan ini menjadi bagian dari segitiga antar WP Kawasan Utara Jawa Barat yang dikendalikan perkembangannya dan segitiga antar WP Kawasan Timur Jawa Barat didorong perkembangannya, dengan kebijakan pengembangan kawasan budidaya yang fokus pada upaya untuk mengoptimalkan potensi lahan budidaya dan sumber daya alam guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah yang belum berkembang karena keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Terkait dengan pengembangan industri, yang tertuang dalam dokumen RPIP Jawa Barat, kawasan ini termasuk dalam WPPI 1 yang fokus pada upaya penguatan dan optimasi, perbaikan aspek lingkungan hidup untuk menciptakan industri yang berkelanjutan, serta memperkuat sinergi antar industri, serta termasuk dalam WPPI 2 yang diarahkan untuk pembangunan infrastruktur penunjang industri dan relokasi industri yang terdapat pada WPPI1.

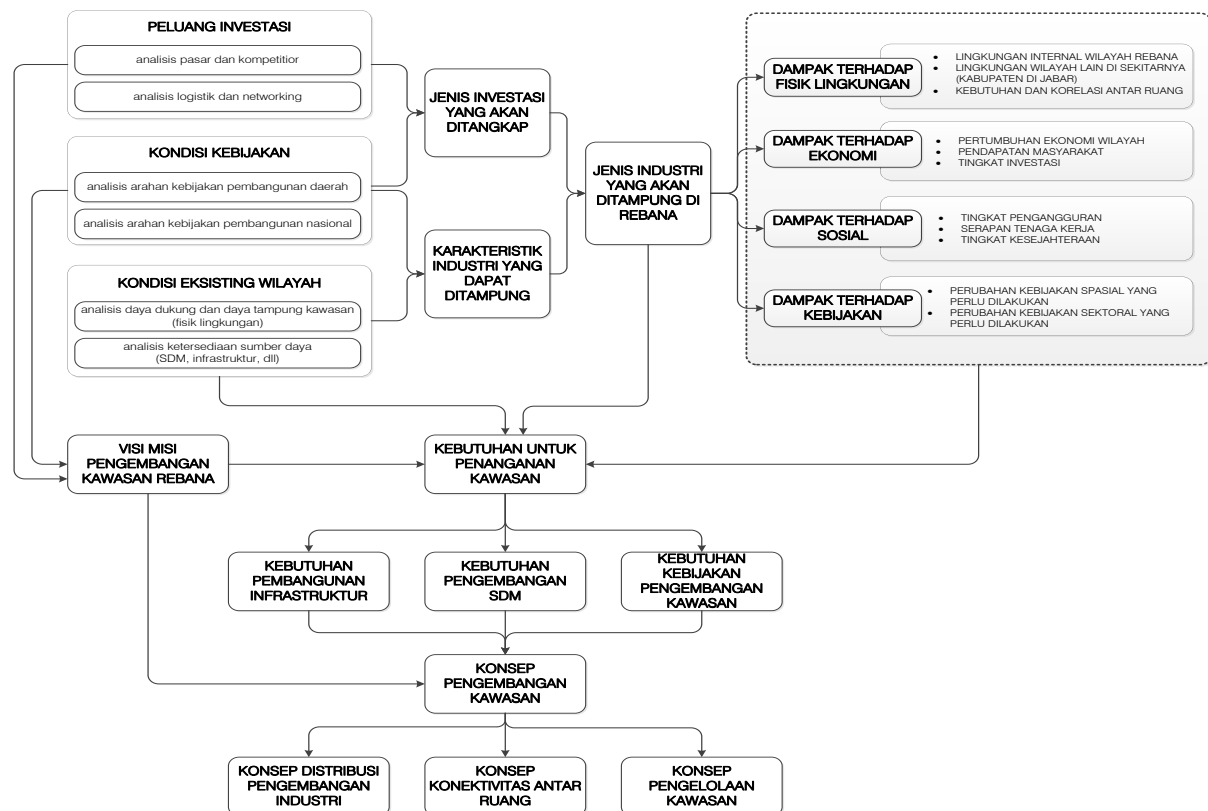
Merujuk pada kebijakan-kebijakan yang berkembang ini, maka pengembangan Kawasan Rebana ini diarahkan pada pengembangan kawasan yang komprehensif, dimana dilakukan pengembangan kawasan industri yang terintegrasi dengan kawasan pelabuhan, kawasan bandara, dan kota baru yang memang diarahkan perkembangan oleh kebijakan nasional pada kawasan ini. Secara ilustrasi, konsep besar pengembangan Kawasan Rebana dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut.



Gambar 2.2 Konsep Besar Pengembangan Kawasan Rebana

Sebagaimana dalam kerangka kerja yang telah disusun (Gambar 2.2), kajian pemantapan pengembangan Kawasan Rebana ini tidak sekedar untuk melihat peluang pengembangannya, melainkan juga mengidentifikasi sejak awal dampak yang akan ditimbulkan baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak ini perlu diidentifikasi sejak awal untuk mengetahui besar manfaat yang akan diterima dari pembangunan kawasan dan konsekuensi yang harus dipersiapkan. Dengan mengetahui dampak tersebut berikut dengan peluang pengembangannya, maka akan dapat diketahui kebutuhan penanganan kawasan

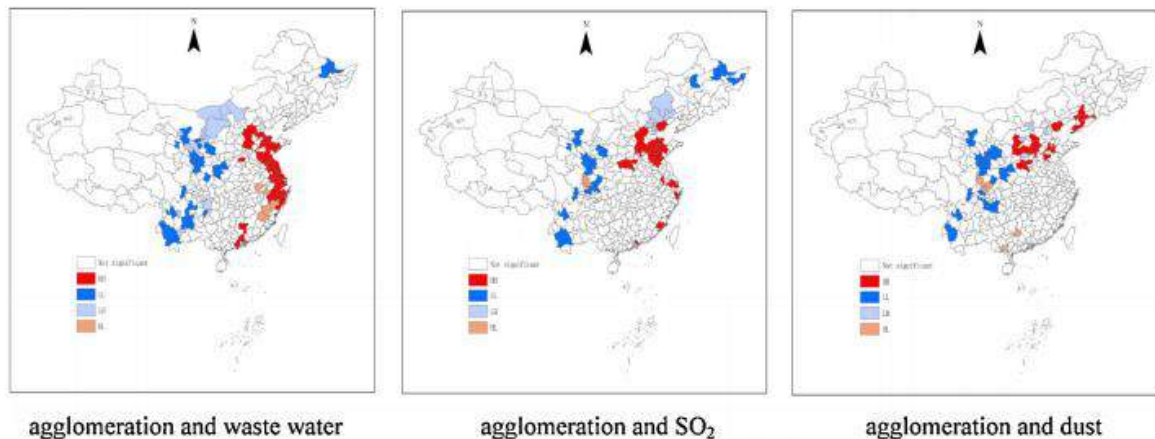
yang selanjutnya menjadi dasar bagi perumusan konsep pengembangan kawasan. Hal ini akan membentuk pola keterkaitan kajian sebagaimana yang digambarkan pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3 Kerangka Pengembangan Kawasan Rebana

2.3 KAJIAN KETERKAITAN KAWASAN UNTUK PENGEMBANGAN KAWASAN REBANA

Dalam konsep pengembangan wilayah, perkembangan kawasan akan **berdampak dan terkait dengan kawasan sekitarnya**. Secara lebih rinci, pengembangan kawasan industri pada suatu wilayah **dapat berdampak pada kerusakan lingkungan di kawasan sekitarnya** (Zheng, 2015) dan membutuhkan/**bergantung pada sumber daya yang tersedia di sekitarnya**. Kondisi ini pernah diidentifikasi oleh Zheng (2015) yang menjelaskan mengenai kerusakan lingkungan yang muncul akibat upaya aglomerasi industri di China yang sifatnya lintas wilayah administrasi, sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 2.4.



Gambar 2.4 Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Aglomerasi Industri yang Dilakukan di China

Merujuk pada kajian yang dilakukan pada kasus studi di China tersebut, maka perlu disadari bahwa pembangunan di Kawasan Rebana ini tidak dapat dipisahkan dari kebijakan yang terjadi pada tingkat nasional, provinsi, maupun wilayah sekitarnya. Dari sisi kebijakan nasional dan provinsi, pengembangan Kawasan Rebana ini terkait dengan beberapa kebijakan. Dalam kebijakan nasional yang tertuang dalam RTRWN, kawasan ini pada dasarnya merupakan kawasan yang berkaitan dengan pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Cirebon yang diarahkan dengan peran menjadi pusat koleksi dan distribusi skala internasional, nasional, dan beberapa provinsi. Selain itu, di dalam dokumen ini juga ditetapkan Indramayu sebagai salah satu PKW dengan peran sebagai pusat koleksi dan distribusi skala nasional. Dalam kebijakan nasional yang tertuang dalam dokumen Rencana Pengembangan Industri Terpadu WPS 8: Jakarta-Cirebon-Semarang dan Rencana Pengembangan Kawasan Perkotaan Cirebon dan Sekitarnya, kawasan ini menjadi kawasan yang menjadi perhatian utama nasional untuk pengembangan infrastruktur.

Rencana Pengembangan Industri Terpadu WPS 8: Jakarta-Cirebon-Semarang, menjelaskan beberapa arahan pengembangan sebagai berikut:

- Pengembangan konektivitas yang menghubungkan tiga pelabuhan internasional yang akan dikembangkan di WPS 8, yaitu Tanjung Priok, **Patimban**, Tanjung Emas – Kendal, serta Bandar Udara Internasional Jawa Barat di Kertajati
- Pengembangan kawasan perkotaan terpadu berbasis industri di sepanjang *backbone* Jakarta – Cirebon – Semarang
- Pengembangan jalan dan konektivitas di sekitar kawasan Kertajati Aerocity, terutama di Ciayumajakuning Region, seperti:
 - Jalan Tol Cisumdawu yang menghubungkan Metro Bandung ke Kertajati
 - Jalan Tol Cikapali yang menghubungkan Industri Kabupaten Karawang ke Kertajati dan Kertajati ke Cirebon
 - Kereta api dari Bandung ke Kertajati dan Kertajati ke Cirebon
- Pengembangan Kab. Karawang, Kab. Subang, dan Kab. Cirebon sebagai simpul industri

Rencana Pengembangan Kawasan Perkotaan Cirebon dan Sekitarnya, terdapat Pengembangan Kawasan Perkotaan Cirebon sebagai: (1) hub regional, (2) transit city, dan (3) strong local culture yang terkoneksi dengan aerocity dan sea port sebagai *core economic*

base. Pengembangan ini akan terkoneksi dengan kawasan permukiman, kawasan industri yang terintegrasi, kawasan bisnis, dan kawasan pariwisata (Gambar 2.5)

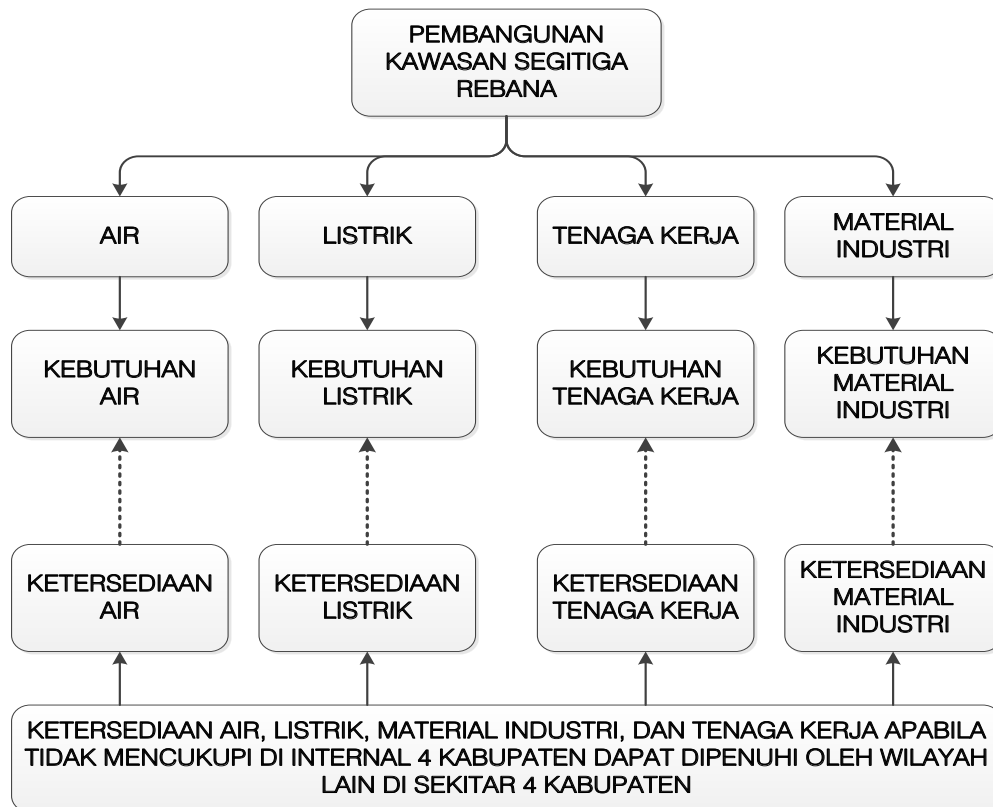


Gambar 2.5 Arah Pengembangan Kawasan Perkotaan Cirebon dan Sekitarnya

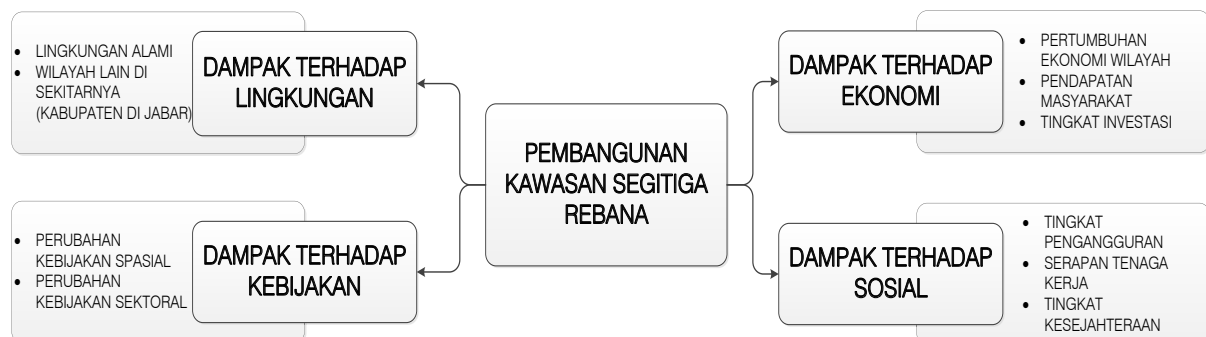
Kedua kebijakan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Rebana akan ikut memperkuat perwujudan kebijakan nasional tersebut. Kawasan Rebana akan dapat menjadi suatu kawasan industri yang terintegrasi dengan kawasan permukiman, kawasan bisnis, dan Aerocity sebagai core economic base, yang pada akhirnya dapat menjadi salah satu kawasan perkotaan terpadu berbasis industri di sepanjang *backbone* Jakarta – Cirebon – Semarang dengan Kab. Subang, Kab. Cirebon dan Kab. Indramayu sebagai simpul-simpul industrinya.

Adapun dari sisi kebijakan RIPPIN 2015-2035, kawasan ini termasuk dalam pengembangan industri prioritas di WPPI 1 (Bogor-Bekasi-Karawang-Purwakarta-Subang) dan WPPI 1 (Indramayu-Cirebon-Majalengka). Dari sisi kebijakan provinsi, kawasan ini menjadi bagian dari segitiga antar WP Kawasan Utara Jawa Barat yang dikendalikan perkembangannya dan segitiga antar WP Kawasan Timur Jawa Barat didorong perkembangannya, dengan kebijakan pengembangan kawasan budidaya yang fokus pada upaya untuk mengoptimalkan potensi lahan budidaya dan sumber daya alam guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah yang belum berkembang karena keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Terkait dengan pengembangan industri, yang tertuang dalam dokumen RPIP Jawa Barat, kawasan ini termasuk dalam WPPI 1 yang fokus pada upaya penguatan dan optimasi, perbaikan aspek lingkungan hidup untuk menciptakan industri yang berkelanjutan, serta memperkuat sinergi antar industri, serta termasuk dalam WPPI 2 yang diarahkan untuk pembangunan infrastruktur penunjang industri dan relokasi industri yang terdapat pada WPPI1.

Dalam kebijakan-kebijakan tersebut, teridentifikasi bahwa Kawasan Rebana ini merupakan bagian dari pengembangan kawasan lainnya di Jawa Barat. Hal ini berarti pembangunan kawasan ini akan berdampak pada kawasan sekitarnya. Selain itu dari sisi infrastruktur, pembangunan Kawasan Rebana ini juga akan berdampak pada adanya kebutuhan air, listrik, tenaga kerja, maupun material industri untuk pembangunan kawasannya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut pada dasarnya tidak hanya hanya dapat dipenuhi dari internal kawasan, melainkan oleh kawasan sekitarnya. Ketersediaan air, listrik, material industri, dan tenaga kerja apabila tidak dapat dipenuhi oleh internal 4 kabupaten yang menjadi lingkup Rebana dapat dipenuhi oleh wilayah lain di sekitarnya (Gambar 2.6).

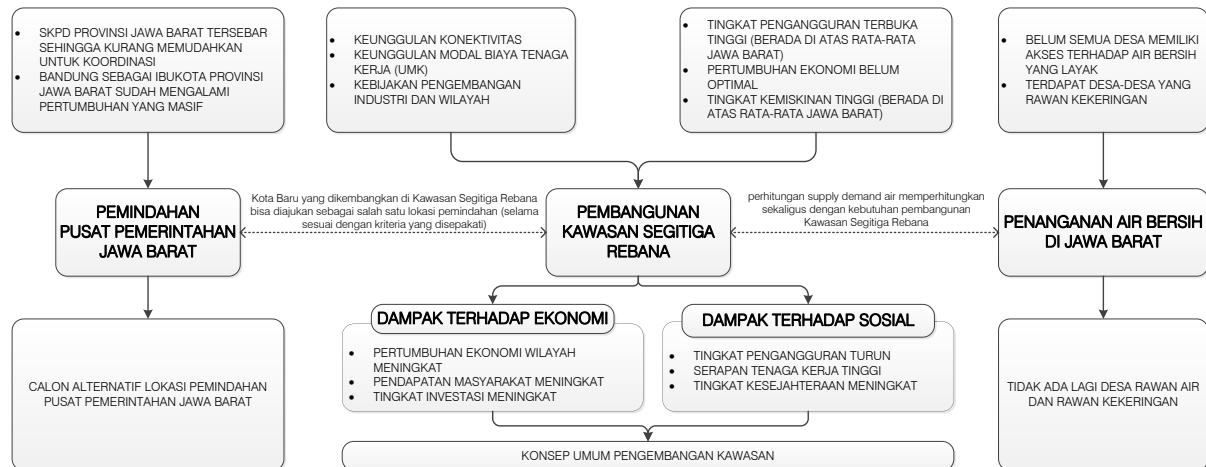


Gambar 2.6 Konsepsi Keterkaitan Kawasan Rebana Dengan Kawasan Sekitarnya



Gambar 2.7 Kemungkinan Dampak yang Ditimbulkan Oleh Pengembangan Kawasan Rebana Pada Kawasan Sekitarnya

Terkait dengan konsep pengembangan ini, maka apabila dikaitkan dengan kajian isu strategis lainnya yang dikembangkan oleh Bidang Kewilayahan dan Infrastruktur Bappeda Provinsi Jawa Barat ini akan memiliki kemungkinan saling terkait, utamanya dengan kajian mengenai potensi kelayakan pemindahan pusat pemerintahan Jawa Barat dan penanganan air bersih di Jawa Barat. Adapun hubungan keterkaitannya dapat digambarkan pada Gambar 2.8 berikut.



Gambar 2.8 Keterkaitan Kajian Pemantapan Pengembangan Kawasan Rebana Dengan Kajian Lainnya yang Terdapat di Bidang Kewilayahan dan Infrastruktur, Bappeda Provinsi Jawa Barat

2.4 KAJIAN DAYA SAING KAWASAN INDUSTRI DI SEKITAR KAWASAN REBANA

Pulau Jawa saat ini masih menjadi barometer bagi pertumbuhan ekonomi nasional, utamanya yang terkait dengan perkembangan kawasan industri, oleh karena itu banyak kawasan industri yang berkembang di Pulau Jawa utamanya di pantai utara Jawa. Merujuk pada kondisi ini, maka pengembangan Kawasan Rebana tidak dapat dipisahkan dari keberadaan kawasan industri di sekitarnya. Kawasan industri yang berada di sekitar Rebana ini akan menjadi daya saing bagi industri yang akan dikembangkan di Rebana dalam rangka menangkap peluang pasar.

Setidaknya terdapat 3 (tiga) kawasan yang sudah sangat berkembang di sekitar Rebana, baik yang berkembang di Provinsi Jawa Barat maupun di luar Jawa Barat, yaitu: (1) Kawasan Industri Kendal di Provinsi Jawa Tengah, (2) Karawang International Industrial City (KIIC) di Provinsi Jawa Barat, serta (3) Kawasan Industri Jababeka di Provinsi Jawa Barat. Untuk melihat daya saing ini, terdapat 6 (enam) hal yang akan diamati, yaitu mengenai waktu pengembangan kawasan, jenis industri, tenaga kerja, investasi, serta dampak sosial ekonomi yang terjadi. Secara rinci kajian terdapat perkembangan ketiga kawasan industri ini dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Perkembangan Kawasan Industri di Sekitar Kawasan Rebana

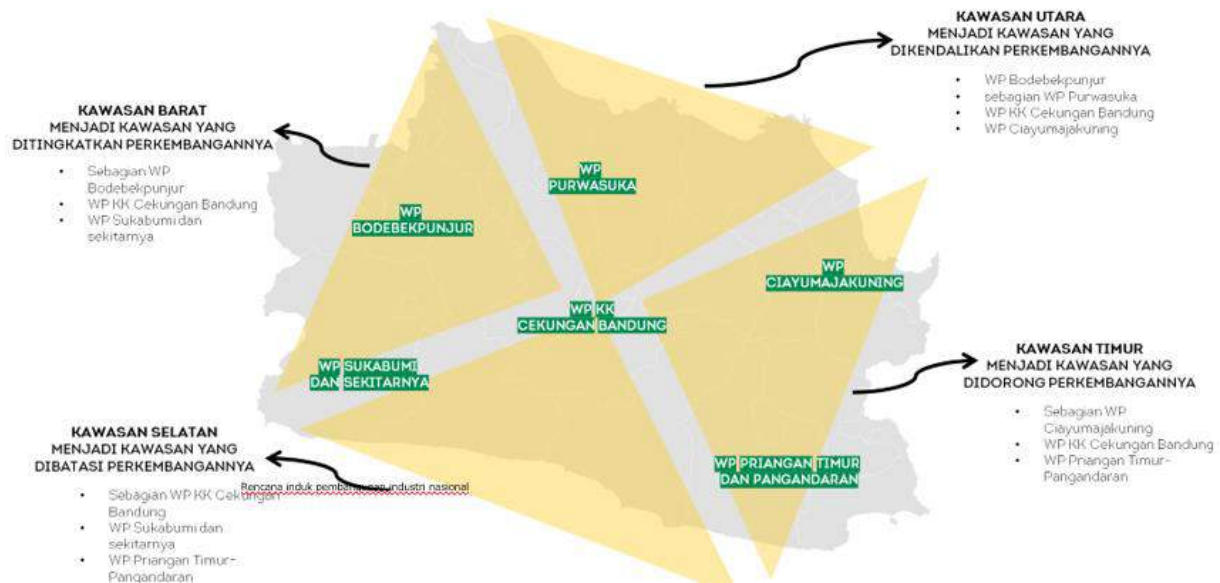
KAWASAN INDUSTRI	PERKEMBANGAN KAWASAN
Kawasan Industri Kendal	• Kawasan ini diresmikan tahun 2016, dengan total luas 2.200 ha. Saat ini pengembangan kawasan memasuki tahap 1. • Pada tahun 2016 – 2018, terdapat 51 penyewa industri berkomitmen di kawasan ini. Jenis industri tersebut, antara lain: makanan minuman, logistik, workshop service, mainan, furnitur dan pengolahan kayu, obat-obatan, baja, kertas, dll. • Pengembangan kawasan ini membangkitkan 5.000.000 tenaga kerja. • Pada tahun 2016-2019, investasi pada kawasan ini mencapai 475 juta US\$. • Pada tahun 2016-2019, trend peningkatan upah minimum mencapai rata-rata 8% serta nilai investasi pada tahun 2015-2017 meningkat 4 kali dari target pemkab.
Karawang International Industrial City (KIIC)	• berkembang dan dipasarkan tahun 2009-an. • Luas lahan yang direncanakan sebesar 43.232,00 Ha, yang sudah dikembangkan sebesar 1.389 Ha. • Jenis-jenis industri yang berkembang, antara lain: suku cadang otomotif, perakitan kendaraan bermotor, pipa pvc, pemotongan baja, ril karet mesin, <i>napkin</i> dan <i>baby diapers</i>, perakitan mobil, <i>logistics center and transportation</i>, <i>plastic wafer shipping box</i>, semikonduktor, obat-obatan, makanan dan komestik, tekstil dan garmen, rokok, serta furnitur. • LPE pada tahun 2009 – 2010 meningkat 4,47% • Terdapat 139 perusahaan yang beroperasi dengantotal investasi yang berputar untuk PMA sebesar 13.689.578,7 ribu US\$ dan PMDN sebesar 34.092.911, 5 juta rupiah. • Laju pertumbuhan investasi 2 tahun setelah kawasan industri ini dipasarkan adalah 102,5% untuk PMA dan 53,62% untuk PMDN.
Kawasan Industri Jababeka	• Kawasan ini didirikan tahun 1989 dalam bentuk kota terpadu seluas 5.600 ha. Saat ini masuk dalam KEK sebagai pusat manufaktur di Indonesia • terdapat 1.650 perusahaan nasional dan multinasional dari 30 negara. • Tidak diperuntukan untuk industri tekstil, logam dan tambang, stamping, kimia dan minyak bumi, kertas, limbah beracun dan berbahaya, pengolahan hewan dan ikan, alkohol dan turunannya, kulit, kayu, rokok, minyak nabati, gula, tapioka dan biji-bijian, semen, keramik, beton instan, bahan psikotropika • Pengembangan kawasan ini membangkitkan 767.000 pekerja dan 4.300 ekspatriat. • Total Investasi 1990 S/D 2019 sebesar 30.537,9 ribu US\$ untuk PMA dan 67.605.609,9 juta rupiah untuk PMDN. • Terjadi lonjakan investasi 2 tahun setelah Jababeka beroperasi, yaitu sebesar 6,29% • PDRB Kabupaten Bekasi 2 tahun pasca Jabebeke beroperasi mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 15%

Berdasarkan kajian perkembangan industri di ketiga kawasan di sekitar Rebana ini, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa jenis industri yang berkembang di dalam kawasan ini memiliki karakteristik yang sama, dengan ragam jenis industri berupa industri **makanan minuman, logistik, workshop service, suku cadang otomotif, perakitan kendaraan bermotor. pipa PVC. pemotongan baja, mainan, furnitur dan pengolahan kayu, obat-obatan, baja, dan kertas**. Hal ini menunjukkan bahwa untuk dapat menangkap peluang pasar yang lebih besar, sebaiknya Kawasan Rebana ini melakukan spesialisasi pada jenis industri yang berbeda. Selain mengidentifikasi karakteristik kawasan industri yang berkembang di sekitar Kawasan Rebana, untuk melihat peluang pengembangan kawasan perlu juga mempertimbangkan hasil kajian peluang pasar yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian. Berdasarkan kajian tersebut teridentifikasi bahwa jenis industri yang diidentifikasi memiliki daya saing positif di Indonesia dengan negara mitra adalah industri kimia, industri makanan dan minuman, dan industri otomotif. Merujuk pada jenis industri yang berkembang pada kawasan industri di sekitar Rebana dan kajian peluang pasar yang dikembangkan oleh Kementerian Perindustrian ini, maka sebaiknya Kawasan Rebana ini memfokuskan pada jenis industri yang diarahkan pada kajian Kementerian Perindustrian.

Selain dari sisi jenis industri, dari perkembangan yang terjadi di kawasan industri yang berada di sekitar Kawasan Rebana ini dapat diidentifikasi bahwa kawasan-kawasan industri tersebut dapat menghasilkan nilai manfaat yang besar bagi perkembangan kawasan regionalnya yang dalam hal ini adalah kota/kabupaten dimana kawasan tersebut berada. Nilai manfaat ini teridentifikasi dari jumlah tenaga kerja yang diserap dan nilai pertumbuhan ekonomi yang tumbuh dengan cepat pada awal pembentukan kawasan dan cenderung stabil setelah 10 tahun perkembangannya. Hal ini dapat menjadi dasar pertimbangan bahwa pengembangan Kawasan Rebana yang dikembangkan dengan basis industri memungkinkan juga memberikan dampak positif bagi perkembangan wilayah di sekitarnya.

2.5 KAJIAN ARAHAN PENGEMBANGAN INDUSTRI

Untuk arahan pengembangan industri di Kawasan Rebana ini pada dasarnya tidak dapat terpisahkan dengan kebijakan provinsi (RTRW Jawa Barat 2015-2035) yang mengarahkan pada pengembangan Kawasan Segitiga Emas Cirebon-Patimban-Kertajati untuk menjadi kawasan yang didorong perkembangannya melalui pengembangan industri skala besar dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan baru. Dari kebijakan RIPIN 2015-2035, kawasan Rebana ini masuk dalam WPPI 2 yang perlu didorong perkembangannya. Adapun dari arahan RPPIP Jawa Barat, Kawasan Rebana ini diarahkan untuk pengembangan industri dengan jenis industri berupa industri pengolahan ikan, bahan penolong, kimia dasar berbasis migas dan batubara, hulu agro, industri petrokimia hulu, resin sintetik dan bahan plastik, logistik, alat transportasi, pengolahan makan, industri pangan, logam, mesin, elektronik, penerbangan, tekstil, furnitur dan barang dari kayu, perkapalan, pakan, bahan galian non logam.



Gambar 2.9 Pengembangan Kawasan Rebana Dalam Kebijakan Pengembangan Provinsi dan Nasional

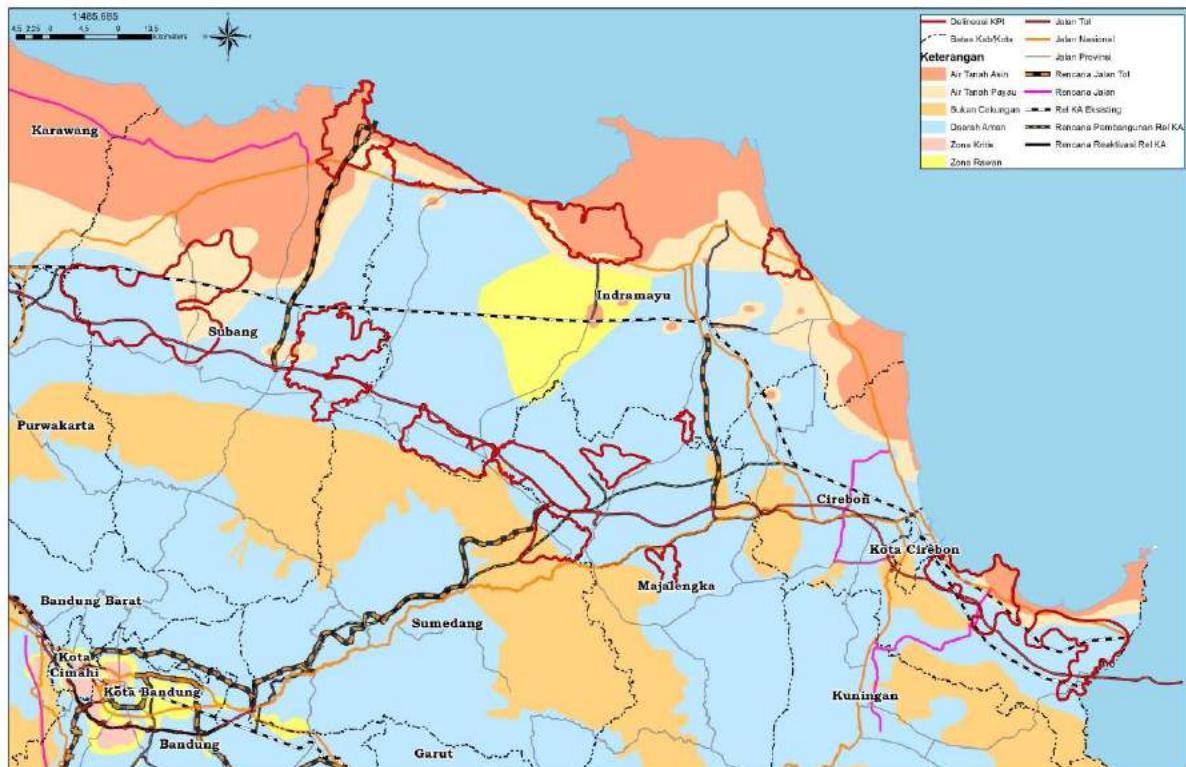
Mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi tersebut, serta mempertimbangkan karakteristik ekonomi lokal di 4 (empat) kabupaten dimana kawasan tersebut berada, dapat diidentifikasi bahwa arahan jenis industri yang berkembang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Arahan Pengembangan Jenis Industri di Kawasan Rebana Berdasarkan Kabupaten

KABUPATEN	JENIS ARAHAN INDUSTRI
Kabupaten Indramayu	- Industri Kimia Hulu (Pengolahan Garam) - Pengolahan Ikan, - Bahan Penolong, - Kimia Dasar berbasis Migas dan Batubara, - Industri Hulu Agro, - Industri Petrokimia Hulu, - Resin Sintetik dan bahan plastik
Kabupaten Cirebon	- Pengolahan Ikan; - Furnitur dan Barang dari Kayu; - Perkapalan, - Industri Pakan, - Bahan Galian Non Logam
Kabupaten Subang	- Ind. Logam, Mesin & Elektronik / Metal, Machinery & Electronic Industry, - Industri pangan, - Logistik (dry port), - Industri Alat Transportasi (otomotif dan perkapalan) - Industri pengolahan makanan,
Kabupaten Majalengka	- Penerbangan, - Cargo/Logistik, - Industri tekstil,

KABUPATEN	JENIS ARAHAN INDUSTRI
	• industri pangan, • Resin sintetik dan plastik

Dari sisi kondisi fisik kawasan, Kawasan Rebana ini memiliki banyak limitasi terutama dari sisi ketersediaan air. Teridentifikasi bahwa kondisi eksisting Pantau Utara Jawa, termasuk Cirebon dan Indramayu ini merupakan kawasan yang rawan akan kenaikan muka air laut dan intrusi air laut (Gambar 2.10). Hal ini berdampak pada karakteristik pengembangan industri yang sebaiknya tidak menggunakan air tanah yang besar dan tidak memberikan beban bagi pembangunan kawasan.



Gambar 2.10 Kondisi Ketersediaan Air Tanah di Kawasan Rebana

Dengan mempertimbangkan karakteristik perkembangan industri di sekitar Kawasan Rebana, hasil kajian peluang pasar Kementerian Perindustrian, arahan kebijakan nasional dan provinsi, serta kondisi fisik lingkungan kawasan, maka dalam pengembangan jenis industri yang akan dikembangkan di Kawasan Rebana ini sebaiknya tidak hanya melihat dari arahan Rencana Induk Perindustrian saja, tetapi juga mempertimbangkan kondisi eksisting wilayah dan competitiveness dengan kawasan industri di sekitarnya, serta limitasi kawasan. Oleh karena itu, **ARAHAN PENGEMBANGAN INDUSTRI NYA SEBAIKNYA BUKAN INDUSTRI-INDUSTRI BERAT (SEPERTI PERKAPALAN, LOGAM, DAN KIMIA) DAN BUKAN INDUSTRI-INDUSTRI YANG MEMBUTUHKAN BANYAK AIR (SEPERTI TEKSTIL DAN PERKAPALAN).**

2.6 DAYA DUKUNG KAWASAN REBANA

Berdasarkan kajian dari Tim Rebana Bappeda Provinsi Jawa Barat, telah diidentifikasi delineasi 11 kawasan yang diusulkan menjadi Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan kawasan pengembangan kota baru, dengan sebaran dan luasan yang dapat dilihat pada Gambar 2.11.



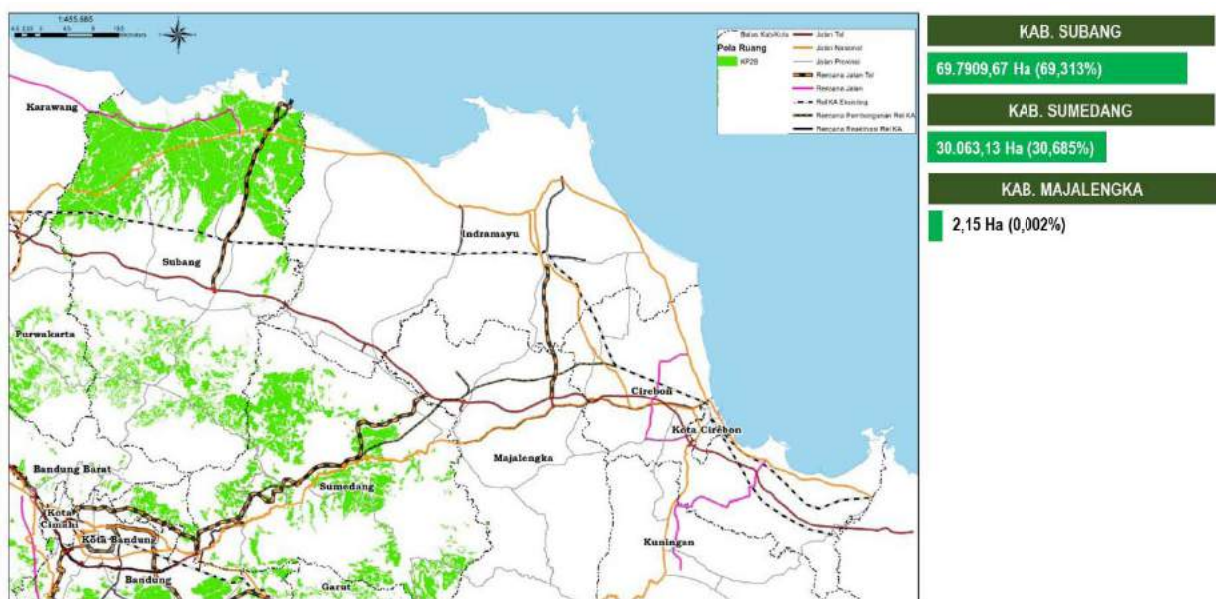
Gambar 2.11 Sebaran dan Delineasi Pengembangan Kawasan di Rebana

Dari 11 kawasan tersebut apabila ditumpangsusunkan dengan sebaran KP2B dan penetapan kawasan lindung, beberapa masih bertampalan, sehingga perlu untuk dikaji ulang proses delineasinya. Hal ini diperlukan karena apabila kawasan yang didelineasi masih memiliki persoalan dengan fungsi lindung kawasan dapat menjadi ganjalan dalam proses pembebasan lahan dan sejenisnya.

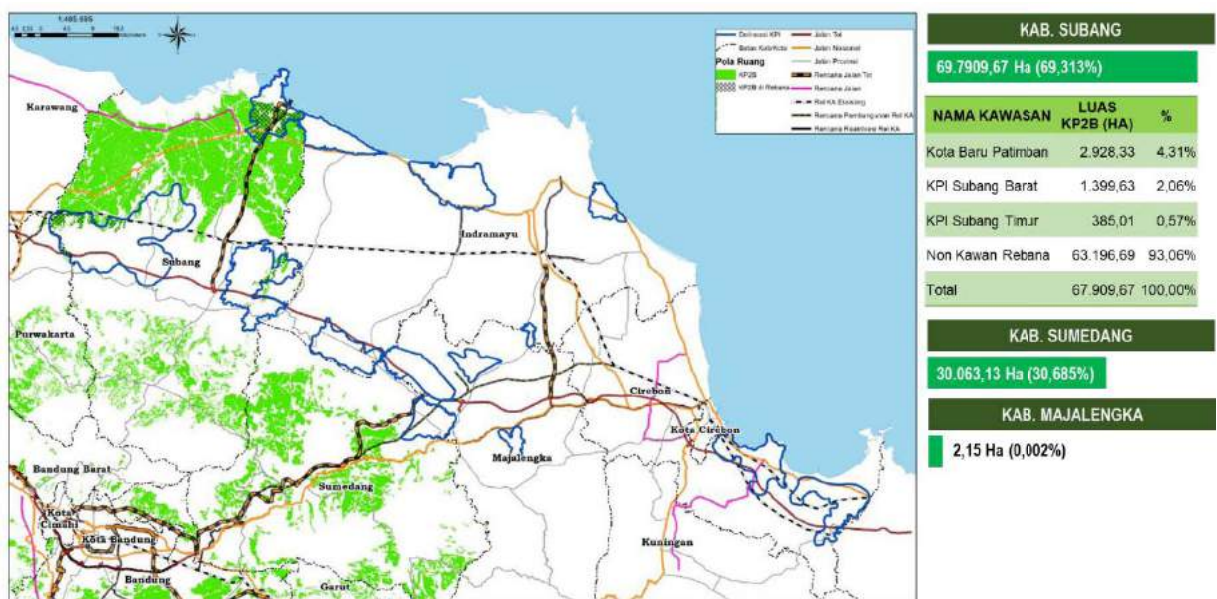
Dari kelima kabupaten yang menjadi lingkup Kawasan Rebana ini, kabupaten yang memiliki KP2B terdapat 3 (tiga) kabupaten, yaitu Kabupaten Subang, Sumedang, dan Majalengka, dengan jumlah luasan dan sebaran sebagaimana yang terdapat pada Gambar 3.4. Dari ketiga kabupaten tersebut, Kabupaten Subang merupakan kabupaten yang memiliki persentase KP2B terbesar yaitu sebesar 69,33%. Adapun untuk di dalam kawasan yang didelineasi sebagai bagian Kawasan Rebana, sebaran KP2B ini hanya terdapat di kawasan yang termasuk di dalam Kabupaten Subang, yaitu di Kota Baru Patimban, KPI Subang Barat, dan KPI Subang Timur dengan persentase terbesar terdapat di Kota Baru Patimban. Secara rinci luasan dan sebaran yang bertampalan dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan Gambar 2.12.

Tabel 2.4 Sebaran Luas KP2B di Kabupaten Subang

NAMA KAWASAN	LUAS KP2B (HA)	%
Kota Baru Patimban	2.928,33	4,31%
KPI Subang Barat	1.399,63	2,06%
KPI Subang Timur	385,01	0,57%
Non Kawan Rebana	63.196,69	93,06%
Total	67.909,67	100,00%

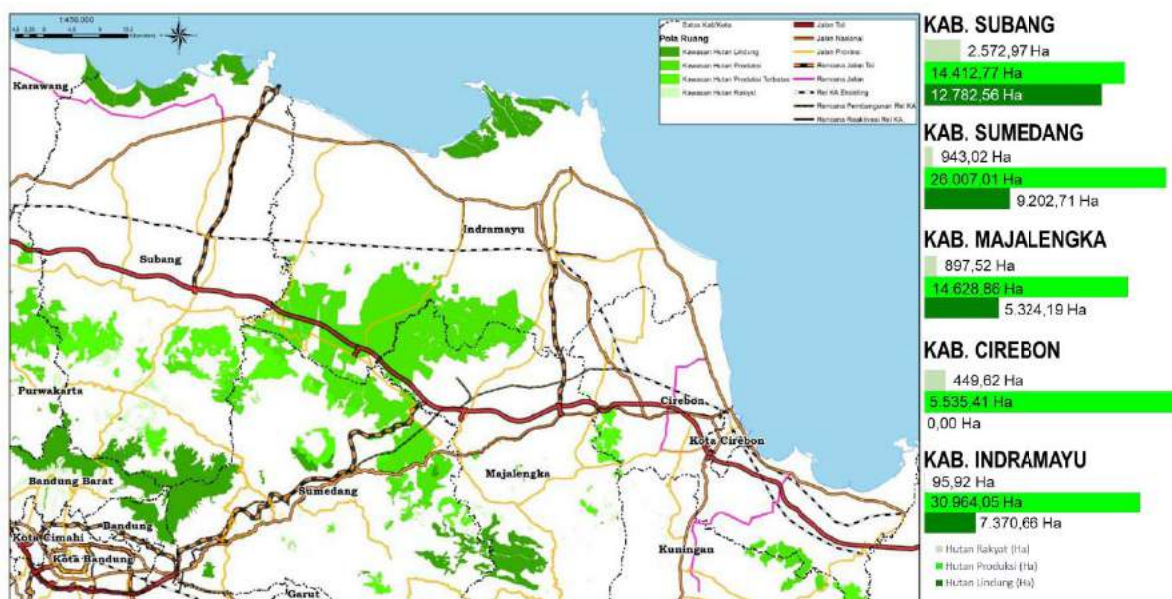


Gambar 2.12 Sebaran KP2B di 4 Kabupaten



Gambar 2.13 Sebaran KP2B di 4 Kabupaten Dengan Delineasi 11 Kawasan Rebana

Terkait dengan sebaran kawasan hutan, kabupaten yang masih bertampalan dengan kawasan hutan tersebar di semua kabupaten, utamanya untuk hutan produksi dengan sebaran dan luasan sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.14.



Gambar 2.14 Sebaran Kawasan Lindung di 4 Kabupaten

Apabila dilihat dari sebarannya di dalam Kawasan Rebana, sebaran kawasan hutan ini terdapat di 8 (delapan) kawasan, yaitu KPI Tukdana, KPI Subang Timur, Kota Baru Patimban, KPI Losarang, KPI Kertajati, KPI Jatiwangi, KPI Cipali-Jatiwangi, dan KPI Balongan, dengan luasan terbesar yang bertepatan terdapat di KPI Kertajati. Rincian sebaran luasan per jenis kawasan hutan yang terdapat di Kawasan Rebana dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Sebaran Kawasan Hutan yang Terdapat di Kawasan Rebana

Nama KPI	Hutan Lindung (Ha)	Hutan Produksi (Ha)	Hutan Rakyat (Ha)	Total (Ha)
KPI Tukdana	0,00	0,60	0,00	0,60
KPI Subang Timur	0,00	8,39	0,02	8,41
KPI Patimban	240,66	0,00	0,00	240,66
KPI Losarang	1,01	0,00	0,00	1,01
KPI Kertajati	0,00	4.226,04	0,48	4.226,52
KPI Jatiwangi	0,00	0,51	0,72	1,23
KPI Cipali-Jatiwangi	0,00	6,08	12,64	18,72
KPI Balongan	0,00	0,00	0,38	0,38
Total	241,66	4.241,62	14,24	4.497,52

2.7 PERINCIAN JENIS INDUSTRI YANG DAPAT DIKEMBANGKAN PADA TIAP KAWASAN

Selain fokus pada kajian terhadap bentuk pengelolaan kawasan, pada bulan Juli ini juga dilakukan pendetailan terhadap jenis industri yang dapat dikembangkan pada tiap kawasan. Kajian ini dilakukan sebagai tidak lanjut dari arahan pengembangan industri yang terdapat

pada berbagai dokumen kebijakan, serta juga memperhatikan kondisi daya dukung dan daya tampung kawasannya. Selain itu dalam kajian ini juga dilakukan dengan memperhatikan investasi industri yang telah berkembang. Dengan mempertimbangkan berbagai poin tersebut, maka rahan jenis industri yang dapat dikembangkan pada tiap kawasan dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut ini.

2.8 PEMETAAN BENTUK PENGELOLAAN KAWASAN

Dalam pengembangannya sebagai kawasan yang berbasis industri, secara teori dan peraturan perundangan yang ada memungkinkan adanya berbagai bentuk pengelolaan kawasan yang memungkinkan untuk diterapkan, dengan rincian sebagaimana pada Tabel 2.7. Dari tiap bentuk tersebut, secara keseluruhan dan dengan memperhatikan kondisi fisik kawasan tersebut dapat teridentifikasi bahwa terdapat berbagai bentuk pengelolaan kawasan yang memungkinkan diterapkan di Kawasan Rebana ini, namun dalam penerapannya perlu memperhatikan kedudukan Kawasan Rebana ini dalam konstelasi sistem perwilayahan nasional dan provinsi. Terkait dengan hal ini, Kawasan Rebana merupakan bagian dari PKW Indramayu, PKN Cirebon, serta menjadi bagian dari PKL Pusakanegara, Losarang, Gantar, dan Kertajati. Dalam konstelasi pengembangan kawasan strategis, kawasan ini merupakan bagian dari KSP Bandara Internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity, KSP Kawasan Industri Cirebon, KSP Kota Baru Patimban, KSP Kawasan Industri Pantura Indramayu, sebagaimana diuraikan pada Gambar 2.15.

Merujuk pada arahan perkembangan struktur ruang dan kawasan strategis, serta merujuk pada berbagai bentuk kawasan yang mungkin, maka terdapat 2 (dua) bentuk utama untuk pengembangan Kawasan Rebana ini, yaitu:

1. Keseluruhan wilayah menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan penamaan berupa KEK Rebana, dimana 11 kawasan di dalamnya menjadi bagian dari KEK tersebut
2. Sebagian wilayah menjadi Kapet/kawasan berikat/kawasan industri sesuai dengan penerapan kebijakan perbabeaan yang diinginkan, dengan konsekuensi nama Rebana hanya akan menjadi nama *branding* kawasan

Tabel 2.6 Analisis Arahannya Industri Tiap Kawasan di Dalam Rebana

KABUPATEN	NAMA KAWASAN	KARAKTERISTIK DAYA DUKUNG LINGKUNGAN	JENIS INDUSTRI YANG TELAH BERKEMBANG	ARAHAN INDUSTRI DALAM RIPPIN DAN RPPIP	ARAHAN INDUSTRI
Kabupaten Subang	Kota Baru Patimban	- Merupakan daerah penyedia sumber daya genetik - Merupakan daerah penyedia air bersih - Merupakan daerah penyedia bahan serat - Merupakan daerah pemurnian air - Merupakan daerah pengolah dan pengurai limbah - Merupakan daerah tempat tinggal dan ruang hidup - Merupakan daerah rekreasi dan ekowisata - Merupakan daerah estetika - Merupakan daerah pendukung pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan tanah - Merupakan daerah pendukung siklus hara - Merupakan daerah produksi primer Merupakan daerah air tanah asin	Belum ada	- Industri logam, mesin dan elektronik / metal, (<i>machinery & electronic industry</i>) - Industri pangan - Logistik (<i>dry port</i>) - Industri alat transportasi (otomotif dan perkapalan) - Industri pengolahan makanan	- Industri yang tidak memberikan beban tanah - Industri yang tidak mengambil air tanah Seperti: - Industri logam, mesin dan elektronik / metal, (<i>machinery & electronic industry</i>) - Industri pangan - Industri pengolahan makanan
Kabupaten Subang	KPI Cipali Subang Barat	- Merupakan daerah penyedia sumber daya genetik - Merupakan daerah penyedia air bersih - Merupakan daerah penyedia bahan pangan - Merupakan daerah penyedia bahan serat - Merupakan daerah pemurnian air - Merupakan daerah pengolah dan pengurai limbah	- Kawasan industri dan pergudangan terpadu - Distribusi gas (pertamina) - Industri karton	- Industri logam, mesin dan elektronik / metal, (<i>machinery & electronic industry</i>) - Industri pangan - Logistik (<i>dry port</i>) - Industri alat transportasi	Industri yang tidak memberikan beban tanah, seperti: - Industri logam, mesin dan elektronik / metal, (<i>machinery & electronic industry</i>) - Industri pangan

KABUPATEN	NAMA KAWASAN	KARAKTERISTIK DAYA DUKUNG LINGKUNGAN	JENIS INDUSTRI YANG TELAH BERKEMBANG	ARAHAN INDUSTRI DALAM RIPPIN DAN RPIIP	ARAHAN INDUSTRI
		- Merupakan daerah pengatur penyerbukan alami - Merupakan daerah tempat tinggal dan ruang hidup - Merupakan daerah siklus hara - Merupakan daerah produksi primer Merupakan daerah air tanah payau		(otomotif dan perkapalan) - Industri pengolahan makanan	- Industri pengolahan makanan - Industri karton
Kabupaten Subang	KPI Cilpali Subang Timur	- Merupakan daerah penyedia air bersih - Merupakan daerah penyedia bahan pangan - Merupakan daerah penyedia bahan serat - Merupakan daerah pengolah dan pengurai limbah - Merupakan daerah pemeliharaan kualitas udara - Merupakan daerah pengatur penyerbukan alami - Merupakan daerah tempat tinggal dan ruang hidup - Merupakan daerah pendukung pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan - Merupakan daerah siklus hara - Merupakan daerah produksi primer - Merupakan daerah aman	- Perternakan sapi terpadu - Penyedia bahan peledak	- Industri logam, mesin dan elektronik / metal, (<i>machinery & electronic industry</i>) - Industri pangan - Logistik (<i>dry port</i>) - Industri alat transportasi (otomotif dan perkapalan) - Industri pengolahan makanan	Semua industri memungkinkan, seperti: - Industri logam, mesin dan elektronik / metal, (<i>machinery & electronic industry</i>) - Industri pangan - Logistik (<i>dry port</i>) - Industri alat transportasi (otomotif dan perkapalan) - Industri pengolahan makanan
Kabupaten Majalengka	KPI Kertajati	- Merupakan daerah penyedia sumber daya genetic - Merupakan daerah penyedia air bersih - Merupakan daerah penyedia bahan bakar		- Penerbangan - Cargo/logistik - Industri tekstil - Industri pangan	Semua industri memungkinkan, seperti: Penerbangan

KABUPATEN	NAMA KAWASAN	KARAKTERISTIK DAYA DUKUNG LINGKUNGAN	JENIS INDUSTRI YANG TELAH BERKEMBANG	ARAHAN INDUSTRI DALAM RIPPIN DAN RPPIP	ARAHAN INDUSTRI
		• Merupakan daerah penyedia bahan pangan • Merupakan daerah pencegah dan pelindung bencana alam • Merupakan daerah penyedia bahan serat • Merupakan daerah pemurnian air • Merupakan daerah pengolaj dan pengurai limbah • Merupakan daerah pemeliharaan kualitas udara • Merupakan daerah pengatur penyerbukan alami • Merupakan daerah pengendali hama dan penyakit • Merupakan daerah tempat tinggal dan ruang hidup • Merupakan daerah pendukung pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan • Merupakan daerah siklus hara • Merupakan daerah produksi primer • Merupakan daerah pendukung biodiversitas • Merupakan daerah aman		• Industri resin sintetis dan plastik	• Cargo/logistik • Industri tekstil • Industri pangan • Industri resin sintetis dan plastik
Kabupaten Majalengka	KPI Jatiwangi	• Merupakan daerah penyedia air bersih • Merupakan daerah penyedia bahan pangan • Merupakan daerah penyedia bahan serat • Merupakan daerah pemurnian air	• Belum ada	• Penerbangan • Cargo/logistik • Industri tekstil • Industri pangan • Industri resin sintetis dan plastik	Semua industri memungkinkan, seperti: • Penerbangan • Cargo/logistik

KABUPATEN	NAMA KAWASAN	KARAKTERISTIK DAYA DUKUNG LINGKUNGAN	JENIS INDUSTRI YANG TELAH BERKEMBANG	ARAHAN INDUSTRI DALAM RIPPIN DAN RPPIP	ARAHAN INDUSTRI
		• Merupakan daerah pengolah dan pengurai limbah • Merupakan daerah tempat tinggal dan ruang hidup • Merupakan daerah pendukung pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan • Merupakan daerah siklus hara • Merupakan daerah produksi primer • Merupakan daerah aman			• Industri tekstil • Industri pangan • Industri resin sintetik dan plastik
Kabupaten Cirebon	KPI Cirebon	• Merupakan daerah penyedia sumber daya genetic • Merupakan daerah penyedia air bersih • Merupakan daerah penyedia bahan pangan • Merupakan daerah penyedia bahan serat • Merupakan daerah pemurnian air • Merupakan daerah pengolah dan pengurai limbah • Merupakan daerah pemelihara kualitas udara • Merupakan daerah pengatur penyerbukan alami • Merupakan daerah tempat tinggal dan ruang hidup • Merupakan daerah rekreasi dan ekowisata • Merupakan daerah estetika • Merupakan daerah pendukung pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan	• PLTU • Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan udang) dalam kaleng serta pembekuan ikan • Industri bahan bangunan • Industri konstruksi berat siap padang dari baja untuk bangunan • Industri pengeolahan garam konsulasi	• Industri pengolahan ikan • Industri furnitur dan barang dari kayu • Industri perkapalan • Industri pakan • Industri bahan galian non logam	• Industri yang tidak memberikan beban tanah Sebaiknya diarahkan untuk industri: • Industri pengolahan ikan • Industri furnitur dan barang dari kayu • Industri perkapalan • Industri pakan • Industri bahan galian non logam • Industri bahan bangunan • Industri pengeolahan garam konsulasi

KABUPATEN	NAMA KAWASAN	KARAKTERISTIK DAYA DUKUNG LINGKUNGAN	JENIS INDUSTRI YANG TELAH BERKEMBANG	ARAHAN INDUSTRI DALAM RIPPIN DAN RPPIP	ARAHAN INDUSTRI
		- Merupakan daerah siklus hara - Merupakan daerah produksi primer Merupakan daerah air tanah asin	Industri pengolahan hotmix dan beton		Industri pengolahan hotmix dan beton
Kabupaten Indramayu	KPI Balongan	- Merupakan daerah penyedia air bersih - Merupakan daerah penyedia bahan pangan - Merupakan daerah tempat tinggal dan ruang hidup - Merupakan daerah rekreasi dan ekowisata - Merupakan daerah pendukung estetika - Merupakan daerah pendukung pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan - Merupakan daerah siklus hara - Merupakan daerah produksi primer Merupakan daerah air tanah payau	Industri petrokima	- Industri kimia hulu (pengolahan garam) - Industri pengolahan ikan - Industri bahan penolong - Industri kimia dasar berbasis migas dan batubara - Industri hulu agro - Industri petrokimia hulu - Industri resin sintetik dan bahan plastik	- Industri yang tidak memberikan beban tanah Sebaiknya diarahkan untuk industri: - Industri kimia hulu (pengolahan garam) - Industri pengolahan ikan - Industri bahan penolong - Industri kimia dasar berbasis migas dan batubara - Industri hulu agro - Industri petrokimia hulu - Industri resin sintetik dan bahan plastik
Kabupaten Indramayu	KPI Losarang	- Merupakan daerah penyedia sumber daya genetic - Merupakan daerah penyedia air bersih	Industri kimia organik sintetis	Industri kimia hulu (pengolahan garam)	Industri yang tidak memberikan beban tanah

KABUPATEN	NAMA KAWASAN	KARAKTERISTIK DAYA DUKUNG LINGKUNGAN	JENIS INDUSTRI YANG TELAH BERKEMBANG	ARAHAN INDUSTRI DALAM RIPPIN DAN RPPIP	ARAHAN INDUSTRI
		- Merupakan daerah penyedia bahan pangan - Merupakan daerah penyedia bahan serat - Merupakan daerah pemurnian air - Merupakan daerah pengolah dan pengurai limbah - Merupakan daerah tempat tinggal dan ruang hidup - Merupakan daerah rekreasi dan ekowisata - Merupakan daerah estetika - Merupakan daerah siklus hara - Merupakan daerah produksi primer Merupakan air tanah asin		- Industri pengolahan ikan - Industri bahan penolong - Industri kimia dasar berbasis migas dan batubara - Industri hulu agro - Industri petrokimia hulu - Industri resin sintetik dan bahan plastik	- Industri yang tidak menggunakan air tanah Sebaiknya diarahkan untuk industri: - Industri kimia hulu (pengolahan garam) - Industri pengolahan ikan - Industri bahan penolong - Industri kimia dasar berbasis migas dan batubara - Industri hulu agro - Industri petrokimia hulu - Industri resin sintetik dan bahan plastik
Kabupaten Indramayu	KPI Patrol	- Merupakan daerah penyedia air bersih - Merupakan daerah penyedia pangan - Merupakan daerah pencegah dan pelindung bencana alam - Merupakan daerah penyedia bahan serat - Merupakan daerah pemurnian air - Merupakan pengolah dan pengurai limbah	- Industri galangan kapal dan industri pendukung - Penyediaan pembangkit listrik (PLN)	- Industri kimia hulu (pengolahan garam) - Industri pengolahan ikan - Industri bahan penolong - Industri kimia dasar berbasis	- Industri yang tidak memberikan beban tanah - Industri yang tidak menggunakan air tanah Sebaiknya diarahkan untuk jenis industri:

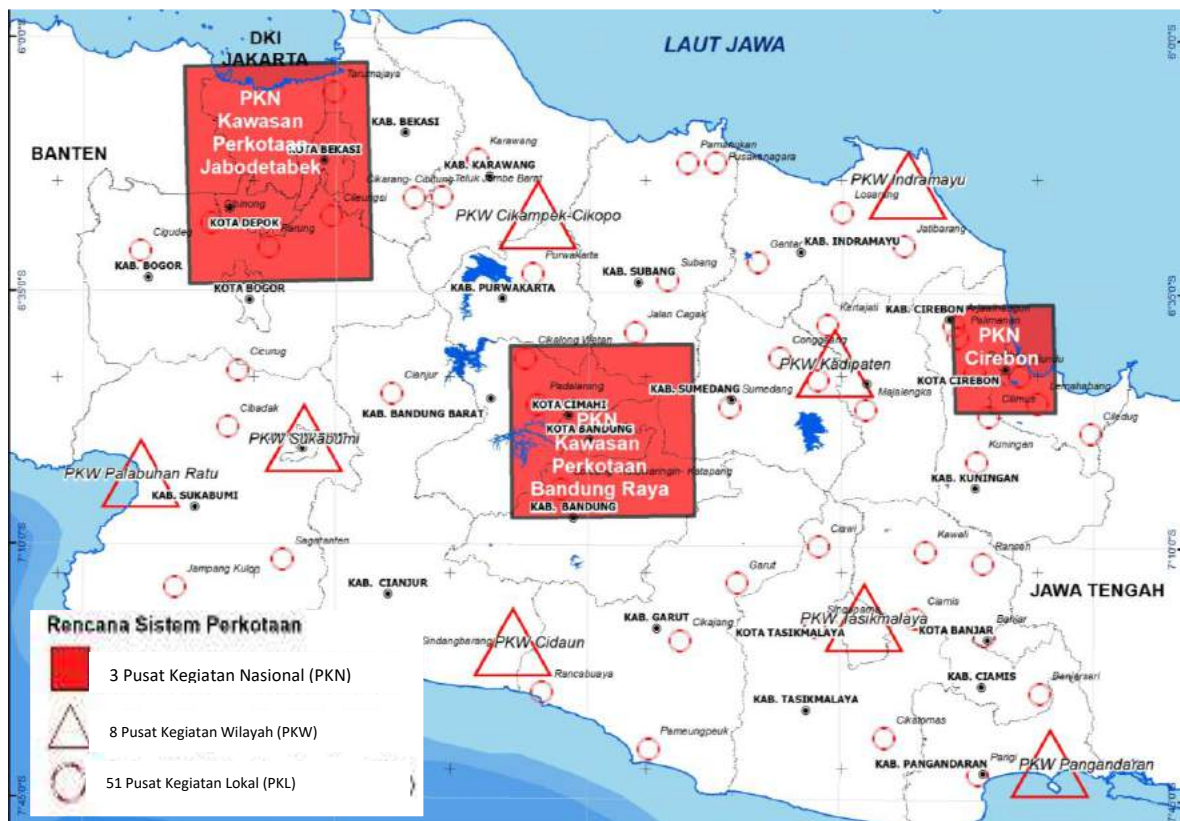
KABUPATEN	NAMA KAWASAN	KARAKTERISTIK DAYA DUKUNG LINGKUNGAN	JENIS INDUSTRI YANG TELAH BERKEMBANG	ARAHAN INDUSTRI DALAM RIPPIN DAN RPPIP	ARAHAN INDUSTRI
		- Merupakan daerah tempat tinggal dan ruang hidup - Merupakan daerah pendukung pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan - Merupakan daerah siklus hara - Merupakan daerah produksi primer Merupakan daerah air tanah asin Merupakan daerah air tanah payau		- migas dan batubara - Industri hulu agro - Industri petrokimia hulu - Industri resin sintetik dan bahan plastik	- Industri kimia hulu (pengolahan garam) - Industri pengolahan ikan - Industri bahan penolong - Industri kimia dasar berbasis migas dan batubara - Industri hulu agro - Industri petrokimia hulu - Industri resin sintetik dan bahan plastik
Kabupaten Indramayu	KPI Cipali Indramayu	- Merupakan daerah penyedia sumber daya genetic - Merupakan daerah penyedia air bersih - Merupakan daerah penyedia bahan bakar - Merupakan daerah penyedia bahan pangan - Merupakan daerah pencegah dan pelindung bencana alam - Merupakan daerah penyedia bahan serat - Merupakan daerah pemurnian air - Merupakan daerah pengolah dan pengurai limbah - Merupakan daerah pemelihara kualitas udara	- Pembibitan ayam ras pedaging - Agro bisnis dan peternakan - Industri pengolahan bahan makanan - Industri metal stamping electricalomotif - Industri knitting (rajut) dan garmen	- Industri kimia hulu (pengolahan garam) - Industri pengolahan ikan - Industri bahan penolong - Industri kimia dasar berbasis migas dan batubara - Industri hulu agro - Industri petrokimia hulu	Semua industri memungkinkan, meliputi: - Industri kimia hulu (pengolahan garam) - Industri pengolahan ikan - Industri bahan penolong - Industri kimia dasar berbasis migas dan batubara

KABUPATEN	NAMA KAWASAN	KARAKTERISTIK DAYA DUKUNG LINGKUNGAN	JENIS INDUSTRI YANG TELAH BERKEMBANG	ARAHAN INDUSTRI DALAM RIPPIN DAN RPPIP	ARAHAN INDUSTRI
		- Merupakan daerah pengatur penyerbukan alami - Merupakan daerah pengendali hama dan penyakit - Merupakan daerah tempat tinggal dan ruang hidup - Merupakan daerah pendukung pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan - Merupakan daerah pendukung siklus hara - Merupakan daerah produksi primer - Merupakan daerah pendukung biodiversitas - Merupakan daerah aman	Industri Ban dalam dan ban luar sepeda motor	Industri resin sintetik dan bahan plastik	- Industri hulu agro - Industri petrokimia hulu - Industri resin sintetik dan bahan plastic - Industri pengolahan bahan makanan - Industri metal stamping electricalomotif - Industri knitting (rajut) dan garmen - Industri Ban dalam dan ban luar sepeda motor
Kabupaten Indramayu	KPI Tukdana	- Merupakan daerah penyedia air bersih - Merupakan daerah penyedia bahan bakar - Merupakan daerah penyedia bahan serat - Merupakan daerah pemurnian air - Merupakan daerah pengolah dan pengurai limbah - Merupakan daerah tempat tinggal dan ruang hidup - Merupakan pendukung pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan - Merupakan siklus hara	Belum ada	- Industri kimia hulu (pengolahan garam) - Industri pengolahan ikan - Industri bahan penolong - Industri kimia dasar berbasis migas dan batubara - Industri hulu agro	Semua industri memungkinkan, meliputi - Industri kimia hulu (pengolahan garam) - Industri pengolahan ikan - Industri bahan penolong

KABUPATEN	NAMA KAWASAN	KARAKTERISTIK DAYA DUKUNG LINGKUNGAN	JENIS INDUSTRI YANG TELAH BERKEMBANG	ARAHAN INDUSTRI DALAM RIPPIN DAN RPPIP	ARAHAN INDUSTRI
		• Merupakan produksi primer • Merupakan daerah aman		• Industri petrokimia hulu • Industri resin sintetik dan bahan plastik	• Industri kimia dasar berbasis migas dan batubara • Industri hulu agro • Industri petrokimia hulu • Industri resin sintetik dan bahan plastik



Gambar 2.15 Persebaran Kawasan Strategis di Provinsi Jawa Barat



Gambar 2.16 Persebaran Struktur Ruang Provinsi Jawa Barat

Tabel 2.7 Berbagai Bentuk Pengelolaan Kawasan

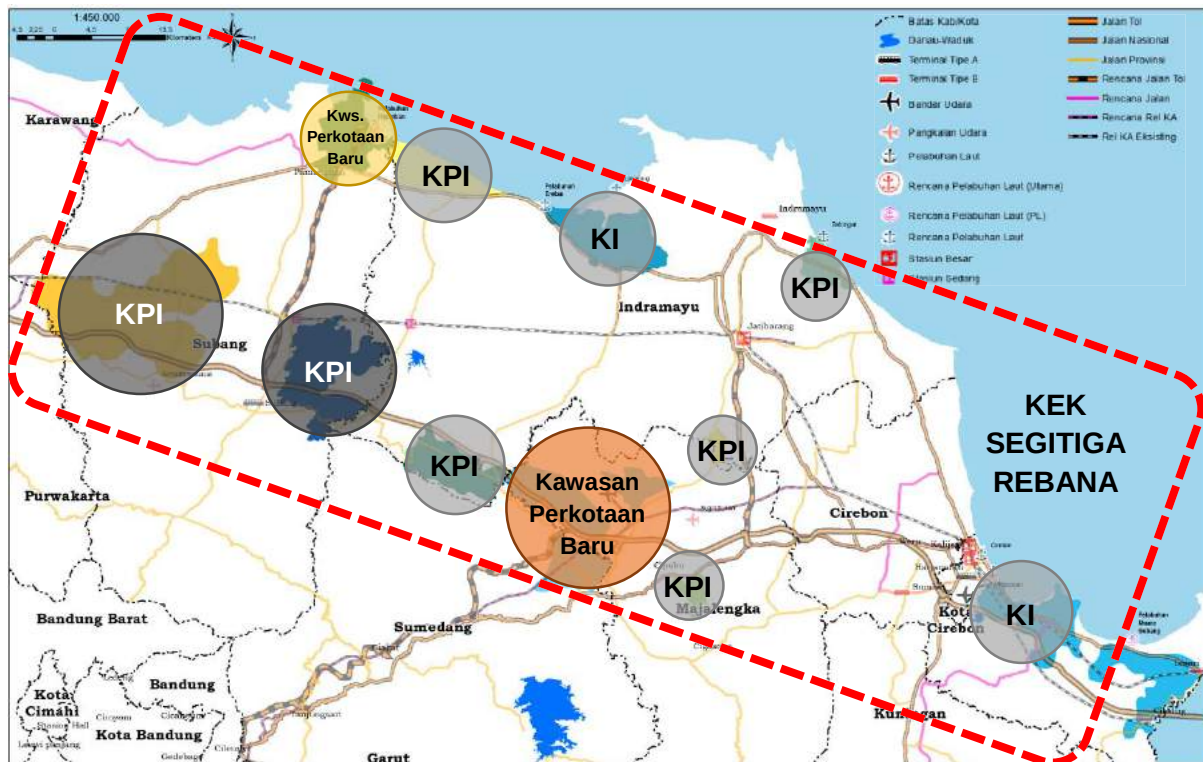
BENTUK KAWASAN	PENGERTIAN	KETERANGAN	SUMBER
KAWASAN INDUSTRI	kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri	• Dikelola oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum • Memiliki luas lahan paling sedikit 50 ha dalam satu hamparan • Apabila kawasan industri diperuntukkan bagi industri kecil dan menengah dapat dibangun dengan luas lahan paling sedikit 5 ha dalam satu hamparan • Kawasan industri dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis satu hamparan • Pengelolaan kawasan industri dilakukan oleh perusahaan kawasan industri atau pihak lain yang ditunjuk oleh perusahaan kawasan industri	Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Peraturan Pemerintah No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri
KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
KAWASAN EKONOMI KHUSUS	Kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Industri yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu	• Terdiri atas satu atau beberapa zona, yang meliputi: – Pengolahan ekspor – Logistik – Industri – Pengembangan teknologi – Pariwisata – Energi – Ekonomi lain • Di dalam KEK dapat dibangun fasilitas pendukung dan perumahan bagi pekerja	Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus

BENTUK KAWASAN	PENGERTIAN	KETERANGAN	SUMBER
		• Di dalam setiap KEK disediakan lokasi untuk usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), dan koperasi, baik sebagai Pelaku Usaha maupun sebagai pendukung kegiatan perusahaan yang berada di dalam KEK • Lokasi KEK harus memenuhi kriteria: – Sesuai dengan RTRW dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung – Pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan mendukung KEK – Terletak pada posisi yang dekat dengan jalur pelayaran internasional atau dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia atau terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan – Mempunyai batas yang jelas • Penyelenggaraan pengembangan KEK adalah dewan nasional yang terdiri atas menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian dan dewan kawasan yang terdiri atas wakil pemerintah dan wakil pemerintah daerah • Dewan kawasan dibentuk pada setiap provinsi yang sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai KEK • Di KEK diberikan kemudahan dan keringanan di bidang perozonan usaha, kegiatan usaha, perindustrian, perdagangan, kepelabuhan, dan keimigrasian bagi orang asing pelaku bisnis, serta diberikan fasilitas keamanan	
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS / FTZ	Kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai,	Fungsi sebagai tempat untuk mengembangkan usaha-usaha di bidang perdagangan, jasa, industri , pertambangan dan energi, transportasi, maritime dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata dan bidang lainnya	Undang-Undang No. 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun

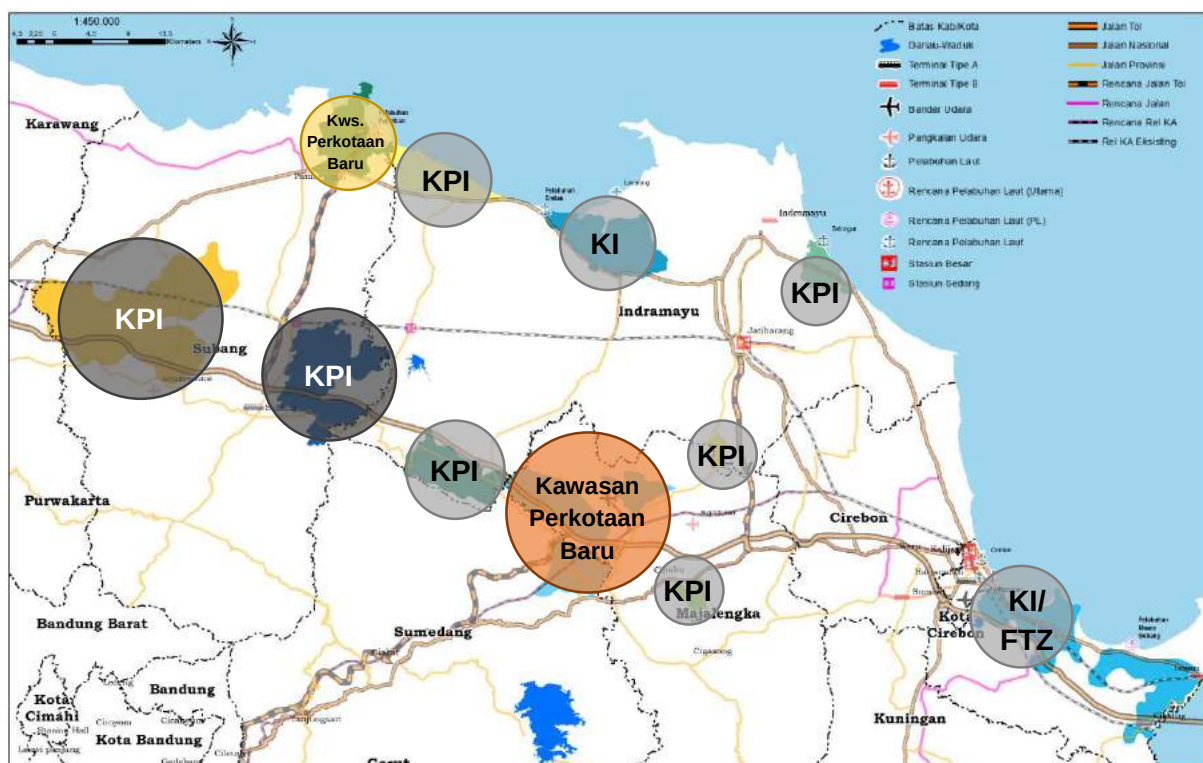
BENTUK KAWASAN	PENGERTIAN	KETERANGAN	SUMBER
	pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai	Fungsi yang dimaksud meliputi: - Kegiatan manufaktur, rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, pengepakan, dan pengepakan ulang atas barang dan bahan baku dari dalam dan luar negeri, pelayanan perbaikan atau rekondisi permesinan, dan peningkatan mutu - Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana air dan sumber air, prasarana dan sarana perhubungan termasuk pelabuhan laut dan bandar udara, bangunan dan jaringan listrik, pos dan telekomunikasi, serta prasarana dan sarana lainnya	2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang
KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU	Wilayah geografis dengan batas-batas tertentu yang memenuhi persyaratan: - Memiliki potensi untuk cepat tumbuh, dan/atau - Mempunyai sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya, dan/atau - Memiliki potensi pengembalian investasi yang besar	- Penetapan KAPET berikut batas-batasnya dilakukan dengan Keputusan Presiden tersendiri - Penetapan kebijakan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pembangunan di KAPET dilakukan oleh Badan Pengembangan KAPET - Kegiatan pengelolaan KAPET dilakukan oleh Badan Pengelolaan KAPET - Badan Pengelolaan KAPET diketuai oleh Gubernur dari wilayah tempat KAPET yang bersangkutan	Keputusan Presiden No. 150 Tahun 2000 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
KAWASAN BERIKAT	Tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor	Kawasan berikat merupakan kawasan pabean dan sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Peraturan Menteri Keuangan Nomor

BENTUK KAWASAN	PENGERTIAN	KETERANGAN	SUMBER
	dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan yang hasilnya terutama untuk diekspor Tempat penimbunan berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk	• Di dalam kawasan berikat dilakukan penyelenggaraan dan perusahaan kawasan berikat • Kawasan berikat harus berlokasi di kawasan industri • Kawasan berikat dapat berlokasi di kawasan budidaya yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sepanjang kawasan peruntukan tersebut diperuntukan bagi: – Perusahaan yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus – Perusahaan industri mikro dan kecil – Perusahaan industri yang menjalankan industri di daerah kabupaten/kota yang belum memiliki kawasan industri atau yang telah memiliki kawasan industri namun seluruh kavling industrinya telah habis • Luas lokasi untuk kawasan berikat di kawasan budidaya paling sedikit 10.000 m² dalam satu hamparan • Kawasan atau tempat yang akan dijadikan sebagai kawasan berikat harus memenuhi persyaratan: – Terletak di lokasi yang dapat langsung dimasuki dari jalan umum dan dapat dilalui oleh kendaraan pengangkut peti kemas – Mempunyai batas-batas yang jelas berupa pagar pemisah dengan tempat atau bangunan lain – Tidak berhubungan langsung dengan bangunan lain – Mempunyai satu pintu utama untuk pemasukan dan pengeluaran barang yang dilalui kendaraan – Digunakan untuk melakukan kegiatan industri pengolahan bahan baku menjadi barang hasil produksi	147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat
KAWASAN PERKOTAAN BARU	Kawasan perdesaan yang direncanakan untuk	• Perencanaan kawasan perkotaan baru diprioritaskan untuk: – Menyediakan ruang permukiman	Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2009 tentang Pedoman

BENTUK KAWASAN	PENGERTIAN	KETERANGAN	SUMBER
	dikembangkan menjadi kawasan berfungsi perkotaan	– Menyediakan ruang baru bagi kebutuhan industri, perdagangan, dan jasa – Menyediakan ruang bagi pelayanan jasa pemerintahan – Menyediakan ruang bagi pembangunan pusat kegiatan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten • Kriteria kawasan perkotaan baru – Sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten – Sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten – Memiliki daya dukung lingkungan yang memungkinkan untuk pengembangan fungsi perkotaan – Bukan merupakan kawasan pertanian beririgasi teknis maupun yang direncanakan beririgasi teknis – Bukan merupakan kawasan lindung • Penetapan lokasi kawasan perkotaan baru harus mendapat persetujuan gubernur • Apabila kawasan perkotaan baru dilaksanakan sendiri oleh pemerintah daerah, maka pemerintah daerah dapat membentuk Badan Pengelola yang mempunyai tugas meliputi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan perkotaan baru	Pengelolaan Kawasan Perkotaan



Gambar 2.17 Ilustrasi Konsep Pengembangan KEK Segitiga Rebana



Gambar 2.18 Ilustrasi Konsep Pengembangan Kawasan Dengan Penyebutan Kawasan Segitiga Rebana Sebagai “Branding Kawasan”

Kedua bentuk tersebut dipilih dengan pertimbangan sebagai berikut:

Tabel 2.8 Dasar Pertimbangan Pemilihan Kedua Bentuk Pengelolaan Kawasan Segitiga Rebana

ALTERNATIF BENTUK PENGELOLAAN KAWASAN SEGITIGA REBANA	DASAR PERTIMBANGAN YANG DIGUNAKAN
Alternatif 1: Keseluruhan wilayah menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan penamaan berupa KEK Rebana	• Terdiri dari 11 kawasan yang berbentuk enclave dan sudah memiliki bentuk pengelolaan masing-masing, yang perlu dikelola oleh suatu bentuk lembaga tertentu yang memiliki fungsi koordinasi. • Kebutuhan untuk pengembangan kawasan yang lebih merata dan mengentaskan masalah sosial ekonomi, sehingga perlu dibangun interkoneksi antar kawasan yang saling mengisi satu sama lain • Untuk menghindari percepatan pembangunan yang tidak seimbang antar satu kawasan dengan kawasan lainnya, sehingga memerlukan suatu bentuk pengelolaan bersama yang mengintegrasikan kesebelas kawasan tersebut
Alternatif 2: Masing-masing kawasan berdiri sendiri pengelolaannya dan nama Rebana hanya menjadi nama <i>branding</i> kawasan	• Terdiri dari 11 kawasan yang berada di 4 kabupaten yang berbeda yang memiliki aturan kebijakan operasional kawasan yang berbeda-beda pula, sehingga untuk kemudahan akan lebih baik bila diserahkan kembali kepada masing-masing kabupaten • Kesebelas kawasan tersebut berbentuk enclave yang terpisah satu sama lain dengan rencana orientasi pengembangan yang berbeda-beda pula • Belum ada deliniasi definitive Kawasan Rebana yang menaungi 11 kawasan yang berada di dalamnya tersebut

Dari kedua pilihan bentuk pengembangan Kawasan Rebana yang diusulkan ini masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan dalam konteks pembangunan wilayah yang lebih luas, dalam hal akselerasi kawasan dan pengaturan kawasan. Adapun kelemahan dan kelebihan dari masing-masing bentuk pengelolaan tersebut akan berimplikasi pada prasyarat dasar yang harus dipenuhi, baik berkenaan dengan pembentukan kelembagaan pengelola maupun dukungan kebijakan spasial sebagaimana yang dituliskan pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9 Kelemahan, Kelebihan, dan Prasyarat Masing-Masing Bentuk Pengelolaan Kawasan Segitiga Rebana

ALTERNATIF BENTUK PENGELOLAAN KAWASAN SEGITIGA REBANA	KELEBIHAN	KELEMAHAN	PRASYARAT PENGEMBANGAN
Alternatif 1: Keseluruhan wilayah menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan penamaan berupa KEK Rebana	• Pengaturan dan pengendalian kawasannya dapat dilakukan secara terintegrasi, karena berada dalam pengelolaan satu lembaga pengelolaan di bawah kewenangan provinsi • Akselerasi pembangunannya bisa lebih cepat karena langsung berada di bawah koordinasi dewan nasional dan dewan kawasan	• Perlu mendorong Rebana sebagai KSN → perlu waktu untuk menunggu revisi RTRWN • Memerlukan batas kawasan yang jelas → memerlukan kajian yang lebih detail mengenai deliniasi ini • Membutuhkan fungsi koordinasi yang kuat untuk mengelolanya	• Menetapkan Kawasan Rebana sebagai KSP dalam rencana struktur ruang RTRWP • Secara bersamaan mengajukan Kawasan Rebana ini sebagai KEK Rebana dan menjadi KSN • Menetapkan 11 kawasan di dalam Kawasan Rebana sebagai KPI dalam rencana pola ruang RTRWP
Alternatif 2: Masing-masing kawasan berdiri sendiri pengelolaannya dan nama Rebana hanya menjadi nama <i>branding</i> kawasan	• Lebih mudah pengaturannya, karena dapat diserahkan langsung kepada pengelola kawasan • Lebih cepat untuk proses implementasinya, karena sangat tergantung pada kesiapan pembangunan per kawasan	• Jaminan untuk integrasi pengembangan antar kawasan diragukan • Perkembangan pembangunan terjadi secara parsial per kawasan • Membutuhkan instrumen pengendalian yang sangat detail untuk penyimpangan yang terjadi • Jaminan pada penegakan pengendalian bergantung pada fungsi kontrol pemerintah kabupaten	• Menetapkan tiap kawasan dalam Rebana sesuai dengan bentuk pengelolaan yang diharapkan • Menetapkan 11 kawasan di dalam Kawasan Rebana sebagai KPI atau KI atau bentuk lainnya yang disepakati dalam rencana pola ruang RTRWP

Kelemahan, kelebihan, serta prasyarat dari tiap alternatif ini pada dasarnya akan membentuk kriteria yang dapat digunakan sebagai dasar pemilihan bentuk alternatif yang paling sesuai. Setidaknya terdapat 6 (enam) kriteria yang dapat digunakan yang diasumsikan memiliki bobot yang sama, yaitu:

- Kemudahan untuk diterapkan
- Kemudahan untuk pengelolaan dan pengendalian perkembangan kawasan skala regional
- Kemudahan untuk pengelolaan dan pengendalian perkembangan kawasan skala kawasan
- Akselerasi pembangunan wilayah
- Integrasi dalam pembangunan wilayah
- Kemudahan untuk pemenuhan prasyarat pembangunan

Dari tiap kriteria tersebut dapat dilakukan penilaian untuk tiap alternatif dengan memberikan tanda + (plus) apabila salah satu alternatif pengelolaan memiliki sifat yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih terintegrasi dibandingkan alternatif yang lainnya, serta akan diberikan tanda – (negatif) apabila alternatif tersebut memiliki sifat yang sebaliknya. Pemberian nilai + (plus) dan – (negatif) ini didasarkan pada metode komparatif sederhana dengan membandingkan kedua alternatif yang diajukan, sehingga pada kriteria yang sama tidak memungkinkan memiliki tanda yang sama untuk kedua alternatif tersebut. Rincian proses penilaian untuk tiap kriteria untuk masing-masing alternatif dapat dilihat pada Tabel 2.10 berikut ini.

Tabel 2.10 Penilaian Kriteria Pada Masing-Masing Bentuk Pengelolaan Kawasan Segitiga Rebana

KRITERIA	Alternatif 1 Keseluruhan wilayah menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan penamaan berupa KEK Rebana	Alternatif 2 Masing-masing kawasan berdiri sendiri pengelolaannya dan nama Rebana hanya menjadi nama <i>branding</i> kawasan
Kemudahan untuk diterapkan	-	+
Kemudahan untuk pengelolaan dan pengendalian perkembangan kawasan dalam skala regional	+	-
Kemudahan untuk pengelolaan dan pengendalian perkembangan kawasan dalam skala kawasan	-	+
Akselerasi pembangunan wilayah	+	-
Integrasi dalam pembangunan wilayah	+	-
Kemudahan untuk pemenuhan prasyarat pembangunan	-	+
Total	Plus = 3, Negatif = 3	Plus = 3, Negatif = 3

Berdasarkan hasil penilaian tersebut dapat diamati bahwa baik alternatif 1 maupun alternatif 2 memiliki poin yang sama untuk jumlah tanda + (plus) maupun – (negatif). Hal ini berarti bahwa keduanya dapat menjadi alternatif yang dipilih, tergantung pada sudut pandang yang diambil.

Dari kedua bentuk alternatif yang diajukan tersebut, pada dasarnya ada 2 (dua) bentuk penetapan kawasan yang ditawarkan, yaitu Kawasan Segitiga Rebana ini sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) terutama dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Baik sebagai KSN maupun KSP, Kawasan Segitiga Rebana ini memiliki poin pemenuhan kriteria sebagaimana yang dapat dilihat pada Tabel 2.11 berikut ini.

Tabel 2.11 Pemenuhan Kriteria KSN dan KSP Pada Kawasan Segitiga Rebana

KRITERIA KSN DAN KSP	KONDISI KAWASAN SEGITIGA REBANA
A. Kriteria KSN	
Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh	• Merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi terbesar ke-3 dan merupakan daerah tujuan perkembangan industri, dimana kepadatan industri di Bekasi-Cikarang-Karawang saat ini sudah tinggi dan membutuhkan daerah pengembangan lainnya di sekitarnya • Merupakan daerah dengan tujuan investasi industri yang ditunjukkan dengan sudah berkembang dinvestasi industri di daerah tersebut ($\pm$ 22 investasi industri skala besar sudah menguasai daerah tersebut)
Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional	Memiliki sumber daya alam (garam, perikanan tangkap, dan pertanian) yang memiliki kontribusi besar di tingkat nasional yang dapat menjadi bahan baku industri untuk peningkatan nilai tambah • Garam memiliki kontribusi di tingkat nasional sebesar 16,67% dan Jawa Barat sebesar 99,1% • Padi memiliki kontribusi di tingkat nasional sebesar 6,17% dan Jawa Barat sebesar 30,25% • Perikanan tangkap memiliki kontribusi di tingkat Jawa Barat sebesar 76,91%
Memiliki potensi ekspor	Memiliki sumber daya alam (garam dan perikanan tangkap) yang memiliki potensi untuk ekspor
Didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi	Memiliki keunggulan konektivitas wilayah, berupa: • Bandara internasional Jawa Barat sebagai simpul konektivitas udara • Pelabuhan Petimban, Losarang, dan Cirebon sebagai simpul konektivitas laut

KRITERIA KSN DAN KSP	KONDISI KAWASAN SEGITIGA REBANA
	• Tol Cipali, Tol Patimban, Tol Cisumdawu yang mempercepat akses Pantura • Rencana akses kereta Tj. Sari – BIJB – Aryawinangun, dan Patimban yang menyediakan angkutan barang dan penumpang
Memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi	Berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan industri yang memanfaatkan teknologi tinggi karena terkoneksi dengan Aerocity Kertajati dan secara daya dukung wilayah pada beberapa kawasannya juga memungkinkan untuk dikembangkan untuk segala jenis industri
Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan nasional dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional	-
Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energy dalam rangka mewujudkan ketahanan energy nasional	Berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan industri yang ramah lingkungan dengan menerapkan konsep <i>eco-industrial park</i> karena
Ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal	• Merupakan daerah dengan UMK kawasan yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Jawa Barat • Merupakan daerah dengan angka kemiskinan yang masih di atas rata-rata Jawa Barat, yaitu sebesar 19,85% • Merupakan daerah dengan nilai IPM yang masih berada di bawah Jawa Barat, yaitu sebesar 66,66 • Beberapa bagian dari kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan pusat pertumbuhan ekonomi baik skala nasional maupun provinsi dalam RTRWN dan RTRWP, yaitu: – PKN Cirebon – PKW Indramayu – KSP Bandara Internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity – KSP Kawasan Industri Cirebon – KSP Kota Baru Patimban – KSP Kawasan Industri Pantura Indramayu
Memiliki intensitas keterkaitan kegiatan ekonomi yang makin tinggi dengan daerah sekitarnya	Kawasan Segitiga Rebana ini berada di antara kawasan industri di Kendal Jawa Tengah dan kawasan industri Bekasi-Cikarang-Karawang Jawa Barat, yang saling terkoneksi melalui jalur

KRITERIA KSN DAN KSP	KONDISI KAWASAN SEGITIGA REBANA
	perhubungan darat dan dapat menjadi kawasan dengan konsentrasi industri yang saling melengkapi.
B. Kriteria KSP	
Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh	• Merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi terbesar ke-3 dan merupakan daerah tujuan perkembangan industri, dimana kepadatan industri di Bekasi-Cikarang-Karawang saat ini sudah tinggi dan membutuhkan daerah pengembangan lainnya di sekitarnya • Merupakan daerah dengan tujuan investasi industri yang ditunjukkan dengan sudah berkembang dinvestasi industri di daerah tersebut ($\pm$ 22 investasi industri skala besar sudah menguasai daerah tersebut)
Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi	Memiliki sumber daya alam (garam, perikanan tangkap, dan pertanian) yang memiliki kontribusi besar di tingkat nasional yang dapat menjadi bahan baku industri untuk peningkatan nilai tambah • Garam memiliki kontribusi di tingkat nasional sebesar 16,67% dan Jawa Barat sebesar 99,1% • Padi memiliki kontribusi di tingkat nasional sebesar 6,17% dan Jawa Barat sebesar 30,25% • Perikanan tangkap memiliki kontribusi di tingkat Jawa Barat sebesar 76,91%
Memiliki potensi ekspor	Memiliki sumber daya alam (garam dan perikanan tangkap) yang memiliki potensi untuk ekspor
Memiliki dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi	Memiliki keunggulan konektivitas wilayah, berupa: • Bandara internasional Jawa Barat sebagai simpul konektivitas udara • Pelabuhan Petimban, Losarang, dan Cirebon sebagai simpul konektivitas laut • Tol Cipali, Tol Patimban, Tol Cisumdawu yang mempercepat akses Pantura • Rencana akses kereta Tj. Sari – BIJB – Aryawinangun, dan Patimban yang menyediakan angkutan barang dan penumpang
Memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi	Berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan industri yang memanfaatkan teknologi tinggi karena terkoneksi dengan Aerocity Kertajati dan secara daya dukung wilayah pada beberapa kawasannya juga memungkinkan untuk dikembangkan untuk segala jenis industri

KRITERIA KSN DAN KSP	KONDISI KAWASAN SEGITIGA REBANA
Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan	-
Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energy dalam rangka mewujudkan ketahanan energy	Berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan industri yang ramah lingkungan dengan menerapkan konsep <i>eco-industrial park</i> karena
Dapat merupakan kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah provinsi	• Merupakan daerah dengan UMK kawasan yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Jawa Barat • Merupakan daerah dengan angka kemiskinan yang masih di atas rata-rata Jawa Barat, yaitu sebesar 19,85% • Merupakan daerah dengan nilai IPM yang masih berada di bawah Jawa Barat, yaitu sebesar 66,66 • Beberapa bagian dari kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan pusat pertumbuhan ekonomi baik skala nasional maupun provinsi dalam RTRWN dan RTRWP, yaitu: – PKN Cirebon – PKW Indramayu – KSP Bandara Internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity – KSP Kawasan Industri Cirebon – KSP Kota Baru Patimban – KSP Kawasan Industri Pantura Indramayu